



DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

JURNAL MIGAS

Issue 03 Januari-Juni 2019

Masyarakat Rasakan Langsung Manfaat Jargas

SAJIAN UTAMA

Saatnya LNG Makin Berperan dalam
Ketahanan Energi Nasional

SAJIAN UTAMA

Catat Rekor, Rasio Cadangan
Migas Nasional

BERANDA

Skema *Gross Split* Makin
Dilirik Investor



Lawan KORUPSI

Demi Kemakmuran Negeri...



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

GEDUNG IBNU SUTOWO
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B 5, Jakarta 12910
Telp. (021) 526 8910, Fax. (021) 526 8980
www.migas.esdm.go.id



Masyarakat Rasakan Langsung Manfaat Jargas

JURNAL MIGAS
Issue 03 Januari-Juni 2019



Memasuki tahun 2019 yang dianggap sebagai tahun politik hampir dipastikan tidak akan mempengaruhi kegiatan minyak dan gas bumi (migas). Dampak tahun politik terhadap aktivitas migas nyaris tidak ada. Kondisi migas lebih banyak dipengaruhi oleh keadaan pasar global, yakni gejolak ekonomi dunia yang mengakibatkan fluktuasi harga komoditas migas.

Permintaan dan penawaran menjadi faktor penentu utama dalam menggerakkan harga komoditas migas. Selain itu, stabilitas keamanan menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan harga komoditas migas ke depannya. Dengan begitu, hal ini dapat menjamin ketersediaan dan distribusi komoditas ESDM untuk para investor.

Berbicara mengenai investor, iklim investasi migas sendiri tak sepenuhnya tepat bila dikatakan lesu. Prognosa investasi subsektor hilir migas tahun 2019, misalnya, mencapai US\$ 993,51 juta, terdiri dari investasi bidang pengolahan sebesar US\$ 519,25 juta, bidang pengangkutan sebesar US\$ 54,97 juta, penyimpanan sebesar US\$ 21,68 juta, niaga sebesar US\$ 10,11 juta serta pembangunan LNG untuk PLN di 4 kota sebesar US\$ 387,5 juta. Pembahasan lebih lanjut mengenai investasi migas ini dapat Anda nikmati dalam Buletin Migas Edisi kali ini.

Sejumlah ulasan lain yang juga dikupas di edisi kali ini antara lain penerapan jargas, gross split, LPG 3 Kg, rasio cadangan migas dan lain-lain. Semoga berbagai ulasan tersebut bermanfaat bagi kita semua. Selamat membaca.



30

>> SOSOK

Investasi meningkat akan membawa multiplier effect

Daya saing minat berinvestasi pada sektor minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia tahun 2018 menunjukkan grafik yang makin kompetitif. Berdasarkan laporan *Petroleum Economics and Policy Solution (PEPS) Global E&P Attractiveness Ranking*, Indonesia menduduki peringkat ke-25 dari penilaian terhadap 131 negara. Catatan ini membuktikan tata kelola sektor migas mampu memikat para investor yang ingin masuk ke Indonesia.

20

>> BERANDA

Skema Gross Split Makin Dilirik Investor

Sejak diberlakukan pada tahun 2017, jumlah kontrak kerja sama migas yang menggunakan skema *gross split* terus bertambah. Hal tersebut menunjukkan bahwa skema *gross split* telah membawa dampak positif terhadap perkembangan investasi migas di Indonesia.

JURNAL MIGAS

Issue 03 Januari-Juni 2019

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab **Sesditjen**
 Redaktur **M. Alfansyah**
 Editor/ Penyunting **Hening Sasmitaning Tyas, Rizky Amalia Wismashanti**
 Desain Grafis dan Fotografer **Agus Mendrofa, Waris Sambodo, Krisna Dinda Bestari**
 Sekretariat **Sinta Raesanti, Kabul Priyono, Hilda Swandani, Tri Sudharma, Koesnobroto**
 Pembuat Artikel **Soerjaningsih, Tursilowulan, Dian Apriani**

6 SAJIAN UTAMA

Masyarakat Rasakan Langsung Manfaat Jargas

10 Saatnya LNG Makin Berperan dalam Ketahanan Energi Nasional

13 Catat Rekor, Rasio Cadangan Migas Nasional

16 BERANDA
 Upaya Meningkatkan Gairah Investasi Migas

20 Skema *Gross Split* Makin Dilirik Investor

23 Upaya Menekan Impor Dengan Penyerapan Minyak Mentah Domestik

26 WACANA
 Mendongkrak TKDN Industri Migas

28 KOLOM

Pentingnya Pemanfaatan dan Pengolahan Data

30 SOSOK
 "Investasi meningkat akan membawa multiplier effect"

33 Upaya Membangun Kilang yang Terintegrasi

36 Kita bisa efisien tanpa mengorbankan *safety* dan juga kinerja tetap baik

38 BICARA DATA

40 SOROT
 Pembangunan Jargas Terus Berlanjut

46 NEWS

Capaian Subsektor Migas Tahun 2018

Sharing Session Bersama Wamen Arcandra

Menteri Jonan Lantik Rizwi Hisjam Sebagai Direktur Hilir Migas

Dirjen Migas Hadiri Rapat Dengar Pendapat dengan DPR

Pelantikan 26 Pejabat Struktural Kementerian ESDM

Pemerintah Bentuk Satgas Atasi *Illegal Drilling*

contents



6

>> SAJIAN UTAMA

Masyarakat Rasakan Langsung Manfaat Jargas

Pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga (*jargas*) merupakan program berkelanjutan Pemerintah untuk memberikan bahan bakar yang murah, bersih, aman dan ramah lingkungan kepada masyarakat. Dampak program ini luas. Manfaatnya pun dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pembukaan IndoGAS 2019

Dirjen Migas Berikan Pengarahan Kepada CPNS Ditjen Migas

Rakor Evaluasi Program Kegiatan 2019

Aplikasi e-Lelang WK Migas Raih Penghargaan Teknologi Informasi dan Inovasi Terbaik

Pipa Gas Grissik-Pusri Resmi Beroperasi

Satu-satunya di Timur Indonesia, PLTMG Ternate Resmi Beroperasi

Dibuka, Lelang WK Migas Konvensional Tahap II 2019

Sedotan Bambu untuk Peringati Peringatan Hari Bumi

Penyaluran Beasiswa kepada Putra PNS Migas Korban Lion Air

10 KKKS Pembayar Pajak Terbesar 2018

Sosialisasi Pedoman Teknis Keselamatan Peralatan dan Instalasi serta Pengoperasian Instalasi SPBU

Ditjen Migas Adakan Bazar Ramadhan

1.506 Pegawai Kementerian ESDM Ikut Mudik Gratis

Hari Pertama Masuk Kerja Usai Libur Lebaran, Ditjen Migas Gelar Halal Bi Halal

Submit Online Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMRB) Tahun 2019

Masyarakat Rasakan Langsung Manfaat Jargas

Pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga (jargas) merupakan program berkelanjutan Pemerintah untuk memberikan bahan bakar yang murah, bersih, aman dan ramah lingkungan kepada masyarakat. Dampak program ini luas. Manfaatnya pun dirasakan langsung oleh masyarakat

Pembangunan Jargas sendiri telah dimulai sejak tahun 2009 dengan menggunakan dana APBN. Hingga tahun 2018, jumlah SR yang dibangun mencapai 325.773 SR di 16 provinsi yang tersebar di 40 kabupaten/kota. Tahun 2019, direncanakan sebanyak 78.216 SR jargas akan dibangun dengan menggunakan dana APBN.

Manfaat langsung

Selain menjadi bagian dalam RPJMN Tahun 2015-2019, jargas juga merupakan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional yang manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Perpres No. 3 Tahun 2016 jo Perpres No. 56 tahun 2018 serta diterbitkannya Perpres No. 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.

Tujuan dari program pembangunan jargas adalah memberikan akses energi kepada masyarakat, memberikan dampak positif kepada masyarakat melalui penghematan pengeluaran biaya bahan bakar,

membantu ekonomi masyarakat menuju ekonomi masyarakat mandiri dan ramah lingkungan dan mengurangi beban subsidi BBM dan/atau LPG pada sektor rumah tangga.

Manfaat jargas secara langsung turut dialami oleh Suryati, Evi, dan Hajjah Sakinah, warga Kota Tarakan. Kini, mereka tidak perlu lagi mengantre di pangkalan untuk membeli LPG 3 Kg. Mulai pertengahan Februari 2019, warga Kampung Enam, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, telah dapat menikmati gas bumi setelah Pemerintah merampungkan pembangunan jargas di kota tersebut belum lama ini.



Sekarang tidak perlu antre lagi. Biasanya, seminggu sekali saya harus antre untuk membeli LPG 3 Kg di pangkalan,”

Suryati (45) - Ibu Rumah Tangga

Antri untuk membeli LPG bersubsidi ini, dilakukan sejak pagi hingga tengah hari. Ini dilakukan agar bisa mendapatkan LPG 3 Kg sesuai dengan HET, yaitu sekitar Rp 16.000 per tabung. Apabila malas mengantre, LPG 3 Kg dapat dibeli di warung dengan harga jauh lebih mahal, sekitar Rp 20.000-25.000 per tabung.

Kegembiraan juga dirasakan Evi (30). Dengan dua anaknya yang masih balita, Evi merasa kerepotan apabila harus mengantre untuk membeli LPG 3 Kg.

“Akhirnya saya lebih sering membeli di warung. Tapi harganya mahal, bisa sampai Rp 25.000 per tabung,” tutur Evi.

Dengan adanya jargas, lanjut Evi, dirinya juga tidak perlu merasa takut kehabisan LPG di malam hari karena gas bumi mengalir 24 jam.

Manfaat jargas, bukan hal baru bagi Hajjah Sakinah. Ketika tinggal di kawasan Sebengkong Waru, Kota Tarakan, dirinya telah merasakan kemudahan menggunakan jargas. Terutama pembayarannya yang murah, hanya sekitar Rp 40.000 per bulan.

“Dulu rumah saya di Sebengkong Waru merupakan tempat pertama yang dipasang jargas. Bayarnya

murah, cuma sekitar Rp 40.000 sebulan. Hematnya banyak banget,” tambahnya.

Pembangunan jargas memang bertujuan untuk mempermudah hidup masyarakat, menekan impor LPG serta menghemat devisa negara. Dari sisi lingkungan, emisi gas bumi juga jauh lebih bersih dibandingkan menggunakan BBM dan kayu bakar. Gas bumi yang dialirkan melalui pipa ke rumah-rumah tangga merupakan gas alam yang sangat bersih. Jargas jauh lebih aman karena tekanannya lebih rendah daripada tekanan LPG 3 Kg. Selain itu, apabila ada kebocoran, gas langsung naik ke atas ke udara bebas, sedangkan gas LPG mengumpul di bawah karena berat jenis gas alam lebih ringan dari LPG.

Manfaat langsung jargas juga dirasakan oleh Pipi (45), seorang warga di Deli Serdang. Ibu rumah tangga yang membuka warung makanan kecil di rumahnya.

“Saya jualan bakso bakar, jus, gorengan dan makanan lainnya,” kata Pipi.

Setiap bulannya, Pipi menghabiskan 8-10 tabung LPG 3 Kg sebagai bahan bakar untuk memasak atau sekitar Rp 80.000-100.000. Dengan menggunakan gas bumi, berdasarkan informasi yang diterimanya, ia hanya perlu membayar sekitar 50%.

Dengan adanya jargas di rumahnya, Pipi juga mengaku sangat senang karena tidak perlu repot harus membeli LPG di pangkalan atau di warung.

“Kita jadi tidak perlu repot lagi. Tidak usah gotong-gotong tabung. Berat juga bawanya, apalagi kalau tidak ada kereta (motor),” papar Pipi dengan nada riang.

Selama sebulan menggunakan gas bumi, Pipi tidak mengalami kendala berarti. Bahkan kini, waktu yang

dibutuhkan untuk memasak lebih singkat karena nyala apinya termasuk besar sehingga makanan cepat matang.

“Lebih asyiklah pokoknya,” tandasnya.

Penugasan tahun 2019

Di tahun ini, Pemerintah menugaskan PT Pertamina (Persero) dalam penyediaan dan pendistribusian gas bumi melalui jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga. Hal ini tercantum dalam Kepmen ESDM Nomor 11 K/10/EM/2019 tanggal 24 Januari 2019.

Penugasan ini antara lain dengan pertimbangan untuk menjamin ketahanan energi nasional dan mempercepat terwujudnya diversifikasi energi melalui percepatan pelaksanaan substitusi BBM dengan gas di sektor rumah tangga, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.

Penugasan kepada Pertamina dilaksanakan melalui PT Perusahaan Gas Negara Tbk selaku anak perusahaan (*sub holding* gas bumi), meliputi:

- Pembangunan jaringan distribusi gas bumi (jargas) untuk rumah tangga beserta infrastruktur pendukungnya di Kota Dumai, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Banggai.
- Pengembangan jargas untuk rumah tangga beserta infrastruktur pendukungnya di Kabupaten Aceh Utara, Kota Palembang, Kota Jambi, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto dan Kabupaten Wajo.

- Penyaluran gas, pengoperasian dan pemeliharaan jargas untuk rumah tangga beserta infrastruktur pendukungnya di Kabupaten Aceh Utara, Kota Dumai, Kota Palembang, Kota Jambi, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Wajo, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Banggai.

Dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan jargas, Pertamina melalui PGN selaku anak perusahaannya, dapat bekerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam melaksanakan penyaluran gas, pengoperasian dan pemeliharaan jargas, Pertamina melalui PGN selaku anak perusahaannya, dapat menunjuk afiliasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penugasan kepada Pertamina dilaksanakan dengan pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Kementerian ESDM tahun anggaran 2019. Penugasan kepada Pertamina dilaksanakan dengan pembiayaan Pertamina melalui PGN selaku anak perusahaan Pertamina.

Dalam melaksanakan penugasan berupa pembangunan dan pengembangan jargas untuk rumah tangga beserta infrastruktur pendukungnya, Pertamina melalui PGN selaku anak perusahaannya wajib:

- Turut serta menjamin kebenaran dan bertanggung jawab atas desain pembangunan jargas untuk rumah tangga beserta infrastruktur pendukungnya secara ekonomis sesuai dengan

kaidah keteknikan yang baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Melaksanakan kewajiban Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) terkait penyediaan dan pendistribusian jargas untuk rumah tangga.
- Menjamin penggunaan material dan komponen yang diproduksi di dalam negeri dalam rangka menumbuhkembangkan kemampuan industri nasional.
- Menjamin penyelesaian, standar mutu, keselamatan pekerja, keselamatan instalasi dan keselamatan lingkungan dalam pembangunan jargas untuk rumah tangga beserta infrastruktur pendukungnya sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Menjamin keselamatan umum, keselamatan pekerja, keselamatan instalasi dan keselamatan lingkungan dalam penyediaan dan pendistribusian jargas untuk rumah tangga beserta infrastruktur pendukungnya.
- Membentuk tim manajemen proyek dalam pembangunan dan pengembangan jargas untuk rumah tangga beserta infrastruktur pendukungnya.
- Memberikan bantuan hukum/pendampingan apabila terdapat kasus hukum terkait perencanaan, penyediaan dan pendistribusian gas bumi untuk rumah tangga beserta infrastruktur pendukungnya.

Dukungan pemda

Keberhasilan pembangunan jargas di berbagai wilayah juga tak terlepas dari dukungan pemerintah daerah (pemda) setempat. Dukungan itu bisa berupa perizinan maupun permasalahan sosial yang

terjadi pada saat pelaksanaan pembangunan.

Dukungan sejumlah pemda ini tercermin saat dilakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Ditjen Migas dengan 18 Pemerintah Kabupaten/Kota tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga, Rabu (13/3), di Jakarta.

Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan oleh Dirjen Migas Djoko Siswanto dengan para Bupati/Walikota, disaksikan oleh Sekretaris Jenderal ESDM Ego Syahrial, Irjen ESDM Syahroza serta undangan lainnya.

“Mengingat proses pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga ini merupakan kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat, perlu didukung dengan adanya Nota Kesepahaman antara Ditjen Migas dengan Pemerintah

Kabupaten/Kota setempat,” ujar Djoko Siswanto.

Djoko meneruskan, “Kami harap Pemerintah Daerah melalui Bapak dan Ibu Bupati/Walikota dapat mempermudah perizinan pada pelaksanaannya nanti serta pengawasannya dan kami berharap bisa selesai tepat waktu. Bahkan sedapat mungkin sebelum akhir tahun 2019 dapat selesai”.

“Kami sangat mendukung program pembangunan penyediaan gas bumi serta infrastrukturnya di daerah kami masing-masing. Dukungan tersebut diantaranya berupa proses perizinan yang tanpa biaya serta penyelesaian permasalahan di masyarakat atas dampak yang terjadi selama pembangunan jargas,” ujar Walikota Palembang Harnojoyo dalam kesempatan yang sama.

Hal senada disampaikan oleh Bupati Banggai Hermin Yatim. Ia mengatakan, pihaknya berkomitmen

menyukseskan pembangunan jargas dan telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait rencana pembangunan jargas ini.

“Pembangunan infrastruktur jargas sudah disosialisasikan kepada masyarakat, bagaimana gas bisa disalurkan ke rumah-rumah tanpa capek-capek lagi membeli LPG 3 Kg atau 12 Kg. Terutama LPG 3 Kg yang sering langka di daerah kami,” papar Hermin.

Lebih lanjut Hermin mengharapkan agar pembangunan jargas di Kabupaten Banggai dilakukan secara berkelanjutan sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat menikmati gas yang murah, bersih dan aman.

“Kami tahun ini dapat 5.000 SR, Alhamdulillah. Semoga ke depan dapat menjadi 10.000 SR dan 20.000 SR,” harapnya.

Persyaratan suatu daerah dapat dibangun jargas yaitu memiliki

atau dekat dengan sumber gas, tersedia infrastruktur penyaluran gas bumi dan ketersediaan pasar atau pelanggan.

Untuk tahun 2019, Kementerian ESDM akan melaksanakan pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga sebanyak 78.216 SR di 17 lokasi, yaitu Kabupaten Aceh Utara (4.490 SR), Kota Dumai (4.810 SR), Kota Jambi (2.000), Kota Palembang (6.000 SR), Kota Depok (6.230 SR), Kota Bekasi (6.720 SR), Kabupaten Karawang (6.861 SR), Kabupaten Cirebon, (6.105 SR), Kabupaten Lamongan (4.000 SR), Kabupaten Bojonegoro (4.000 SR), Kota Mojokerto (4.000 SR), Kabupaten Mojokerto (4.000 SR), Kabupaten Pasuruan (4.000 SR), Kabupaten Probolinggo (4.000 SR), Kabupaten Banggai (4.000 SR), Kabupaten Wajo (2.000 SR), dan Kutai Kartanegara (5.000 SR). ●



Saatnya LNG Makin Berperan dalam Ketahanan Energi Nasional

Pemerintah terus berupaya meningkatkan ketahanan energi nasional dengan mendorong pemanfaatan berbagai sumber energi di Indonesia. Gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG) bisa menjadi pilihan logis.



Saat ini, Pemerintah mendorong pembangunan fasilitas dan infrastruktur terminal mini LNG (*small scale* LNG) di berbagai wilayah di Indonesia. Infrastruktur ini dinilai tepat digunakan untuk menunjang pemenuhan kebutuhan gas di negara kepulauan.

Pembangunan infrastruktur

Dirjen Migas Djoko Siswanto, dalam diskusi di IndoGAS 2019, Senin (19/2), menjelaskan, terminal mini LNG pertama telah digunakan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) di Sambera, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. LNG pembangkit ini berasal dari Bontang yang berjarak 80 km dan diangkut dengan menggunakan truk. Setiap hari, sebanyak 24 truk bergantian mengisi PLTG. Terminal mini LNG juga akan dibangun di Ternate, Nabire, Jayapura, Kendari dan Flores.

“Ini (pembangunan mini LNG) akan terus dikembangkan karena negara kita negara kepulauan. Potensi Small

scale LNG cukup bagus dan di daerah (Indonesia) Timur akan dibangun oleh PGN,” tutur Djoko.

Pembangunan terminal mini LNG merupakan salah satu capaian Kementerian ESDM yang manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat. Dengan masuknya LNG, biaya energi primer yang dihemat sebesar Rp 70 miliar per tahun. Penggunaan LNG juga dapat menurunkan biaya pokok produksi (BPP) pembangkit sebesar 38%.

Selama ini lantaran keterbatasan infrastruktur, sebagian besar produksi LNG Indonesia diekspor. Berdasarkan data Kementerian ESDM, pemanfaatan LNG untuk domestik baru sekitar 405,2 BBTUD. Sementara LNG yang diekspor mencapai 1.907,8 BBTUD. Dengan adanya terminal mini LNG, pemanfaatan LNG untuk domestik dapat ditingkatkan.

Kerja sama dengan negara lain

Selain dengan mendorong pembangunan fasilitas dan infrastruktur *small scale* LNG di berbagai wilayah, Pemerintah

juga akan bekerja sama dengan Pemerintah Amerika Serikat dan Jepang dalam mengembangkan bisnis LNG di Indonesia.

“Gas telah mengambil peran penting dalam bauran energi Indonesia. Ditargetkan bahwa gas akan mengambil 22% bagian dalam bauran energi pada tahun 2025 dan 24% pada tahun 2050. Sejak 1977, Indonesia telah menjadi pemain penting dalam bisnis gas dunia dengan memegang 1,53% dari cadangan gas dunia.

Indonesia masih berada di lima besar eksportir LNG pada tahun 2017. Saat ini, kami mengubah penetrasi energi dari dominan minyak ke dominan gas,” terang Djoko dalam paparannya di Indonesia-US-Japan LNG *Workshop* di Hotel Pullman Jakarta, Senin (5/2).

Djoko menjelaskan, dalam mengelola cadangan gas, kami berusaha sebaik mungkin untuk menemukan lebih banyak sumber daya gas dan menemukan cara untuk mentransfer sumber daya menjadi cadangan terbukti.

Di sisi penawaran, Pemerintah Indonesia sedang mengembangkan pasokan gas untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat. Di sisi ekonomi, Pemerintah berusaha memastikan bahwa aktivitas hulu gas masih menarik bagi investor.

Sementara itu, Wakil Duta Besar AS untuk Indonesia Heather Variava, mengatakan acara LNG *Workshop* ini digelar dengan penekanan pada usaha memenuhi permintaan gas alam cair (LNG) Indonesia yang terus bertambah. Lebih dari 250 peserta dari sektor pemerintahan dan swasta berkumpul untuk mendiskusikan rencana pertumbuhan LNG Indonesia dan bagaimana perusahaan Jepang, Amerika Serikat, dan Indonesia berkontribusi melalui segi pembiayaan dan teknologi.

Peserta dari Pemerintah Jepang dan Amerika Serikat juga menggambarkan upaya internasional guna mendukung ketahanan energi dan mempromosikan pasar energi yang terbuka, transparan, dan berdasarkan peraturan.

“Pemerintah AS siap memberikan bantuan apapun yang bisa diberikan untuk mendukung kolaborasi energi antara tiga negara untuk memajukan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Amerika Serikat, sebagai salah satu eksportir LNG dan penyedia teknologi terdepan, siap untuk bermitra dengan Indonesia dan Jepang untuk memenuhi permintaan energi yang meningkat,” jelas Variava.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Duta Besar Jepang untuk Indonesia Keiichi Ono. Ono mengatakan ini merupakan kali pertama membahas mengenai LNG.

“Jepang dan Indonesia telah banyak melakukan kerja sama untuk LNG. Indonesia merupakan produsen dan pasar yang besar. Jepang juga mengimpor LNG dari Indonesia,” tambah Ono.

Pemerintah berharap dengan adanya kerja sama ini industri minyak dan gas di Indonesia dapat terus berkembang, serta dapat menarik lebih banyak investor untuk berinvestasi dalam

pengembangan infrastruktur gas di Indonesia.

Djoko menambahkan bahwa selama ini produk LNG Indonesia diekspor ke negara, seperti Jepang, Thailand, Amerika Serikat, Singapura, serta Malaysia. Selain di ekspor, produksi LNG juga digunakan untuk kebutuhan dalam negeri khususnya pembangkit PLN.

“Untuk tahun ini, Indonesia hanya membutuhkan 60 kargo LNG untuk kelistrikan dalam negeri. Sedangkan, pasokan LNG Indonesia cukup berlimpah. Itu lebih dari cukup. Kalau dari perjalanan masih ada, kita juga siap suplai. Karena kita masih banyak LNG yang masih bisa kita jual, untuk ekspor. Sampai 2025, masih ada 40 kargo LNG Indonesia yang belum ada pembelinya atau *uncommitted cargo* hingga saat ini,” jelas Djoko.

Saat ini, gas domestik digunakan untuk pembangkit listrik (12,78%), industri termasuk industri pupuk dan industri lainnya (36,19%), ekspor LNG (28,37%), ekspor gas pipa (11,33%),





lifting minyak domestik (2,81%), dan lainnya penggunaan domestik (8,52%). Di masa depan, pasokan LNG untuk pembeli domestik akan meningkat seiring dengan pengoperasian pembangkit listrik PLN sebesar 35 GW.

Mengembangkan LNG untuk Rumah Tangga

Setelah membangun jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga secara masif, Pemerintah berencana memanfaatkan LNG untuk rumah tangga di daerah-daerah yang tidak memiliki sumber gas bumi.

Djoko Siswanto, Senin (11/3), menyampaikan, selama ini pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga (jargas) dilakukan di daerah yang memiliki sumber gas bumi atau dekat dengan sumber gas. Selanjutnya, jargas juga dibangun di daerah yang memiliki jaringan transmisi atau dilintasi pipa gas.

Di sisi lain, daerah lain yang tidak memiliki sumber gas, juga berkeinginan menikmati gas untuk rumah tangga. Karena itulah, Pemerintah berencana memanfaatkan LNG untuk rumah tangga di daerah yang tidak memiliki sumber gas.

Menurut Djoko, ke depan pembangunan jaringan gas tidak lagi hanya ada pada wilayah yang memiliki sumber gas dan infrastruktur

pipa. Sebelumnya, gas didatangkan dari sumbernya berupa gas alam cair. Nantinya, LNG diubah pada infrastruktur regasifikasi menjadi gas bumi, sehingga wilayah yang tidak terdapat sumber gas juga menikmatinya.

“Kalau tidak ada keduanya, kita bisa pakai LNG, di situ kita kembangkan juga jaringan gas,” tutur dia.

Proses tersebut sebenarnya sudah diterapkan di beberapa wilayah. Namun, peruntukan gas digunakan sektor industri dan kelistrikan.

“Yang sudah jalan mini LNG kan Sambera, kemudian Bali di Benoa. Nantilah dijelaskan, LNG masuk *roadmap*,” tandasnya.

Mengenai keekonomian LNG untuk rumah tangga, menurut Djoko, masih dapat terjangkau masyarakat. Nantinya, Pemerintah akan membantu dengan membangun infrastrukturnya.

“Keekonomiannya masih bisa,” tegasnya.

Potensi melimpah

Djoko Siswanto mengatakan bahwa Indonesia masih memiliki cadangan gas alam cair atau LNG sebesar 135,55 *trillion standard cubic feet* (TSCF) di seluruh Nusantara.

“LNG di Indonesia potensinya masih banyak. Oleh karena itu perlu kerja sama dengan berbagai pihak untuk mengolah potensi tersebut, salah satunya mendatangkan investor,” kata Djoko Siswanto dalam pertemuan tiga negara Indonesia, Amerika Serikat, dan Jepang di Jakarta, Selasa (5/3).

Dari beberapa total cadangan migas tersebut, cadangan terbukti memiliki angka sebesar 99,06 TSCF, dan cadangan potensi sebesar 21,26 TSCF dan cadangan harapan sebanyak 18,23 TSCF.

Djoko memaparkan data yang menunjukkan bahwa cadangan terbukti di daerah Aceh sebesar 0,89 TSCF, kemudian Sumatera Utara 0,40 TSCF untuk cadangan terbukti. Selain itu, Sumatera bagian tengah memiliki cadangan terbukti sebesar 1,84 TSCF dan Sumatera Selatan 6,65 TSCF.

Cadangan gas terbesar ada di Natuna yang sudah terbukti sebesar 46,96 TSCF. Kemudian di Jawa Barat cadangan gas terbukti ada 2,89 TSCF dan di Jawa Timur cadangan gas terbuktinya sebesar 2,98 TSCF. Di Kalimantan dan Sulawesi cadangan gas terbuktinya sebesar 5,41 TSCF dan 1,78 TSCF. Kemudian di Maluku dan Papua masing-masing 11,93 TSCF dan 14,33 TSCF. ●

Catat Rekor, Rasio Cadangan Migas Nasional

Ditjen Migas mencatat adanya kenaikan rasio cadangan migas yang signifikan di tahun 2018. Target pemerintah tahun ini adalah 100%, namun berkat persetujuan proposal pengembangan (*Plan of Development/PoD*) di sejumlah proyek *Reserve Replacement Ratio* (RRR) bisa lampau target jadi 105%.

Rasio cadangan migas adalah perbandingan antara cadangan migas yang ditemukan dan yang diproduksi atau biasa disebut RRR di Indonesia. Sebelumnya, rasio cadangan migas RI hanya 74%. Artinya produksi lebih banyak ketimbang temuan cadangan baru.

Lima proyek RRR

Dirjen Migas Djoko Siswanto menilai, adanya peningkatan RRR ini ditopang dari persetujuan PoD I di lima lapangan. Ia menjelaskan, ada empat persetujuan PoD I yang berasal dari *Production Sharing Cost* (PSC) *cost recovery* dan satu persetujuan PoD I dari PSC *gross split*.

Lebih lanjut, Djoko menjabarkan, jumlah PoD yang disetujui itu berasal dari:

1. Blok Batanghari, Lapangan North West Kenanga yang dioperatori PT Gregory Gas Perkasa
2. Blok Wain, Lapangan Karamba, Operator PT Pandawa Prima Lestari
3. Blok Kasuri, Lapangan Asap, Kido dan Merah, Operator Genting Oil Kaasuri Pte
4. Blok South West Bukit Barisan, Lapangan Sinarmar, Operator PT Riski Bukit Barisan Energi
5. Blok East Sepinggan, Lapangan Marakes, Operator Eni East Sepinggan Ltd.

“Total perkiraan *government take* yang diterima dari adanya lima persetujuan PoD tadi sekitar US\$ 3,9 miliar,” ungkap Djoko melalui keterangan resminya, Senin (14/1).

Adapun, berdasarkan data Ditjen Migas, rasio cadangan pengganti migas Indonesia dalam setahun terakhir dari lima persetujuan PoD I mencapai 542 *million barrel oil* (MMBO) untuk minyak dan 555 *billion standard cubic feet* (BSCF) untuk gas. Sementara itu, total cadangan minyak dan kondensat di Indonesia adalah 7,51 miliar barel dan 135,55 *trillion standard cubic feet* (TSCF) untuk gas bumi.

Selama tahun 2018, Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk peningkatan kegiatan eksplorasi melalui percepatan persetujuan PoD I. Hasilnya, produksi migas hingga akhir Desember 2018 bisa mencapai angka 772,25 ribu barel minyak per hari (BOPD) untuk minyak dan 7.760 MMSCFD untuk gas. Ini berarti, dari satu barel minyak yang diproduksi, tingkat pengembalian penggantinya sekitar satu barel.

Usaha masif

Penemuan cadangan migas nasional tak terlepas dari usaha masif dan progresif Badan Usaha, seperti yang ditunjukkan oleh PT Pertamina (Persero) dalam mencari sumber

migas baru. Selama kuartal I tahun 2019, perusahaan migas berplat merah ini berhasil menemukan tiga cadangan migas baru untuk dilakukan eksplorasi.

Pada Februari lalu, Pertamina menemukan cadangan migas dari sumur Randuwangi di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Sumur ini diperkirakan menampung cadangan minyak sebesar 15 juta barel setara minyak (MMBOE). Selain itu, Pertamina EP juga berhasil menemukan cadangan gas dan kondensat di area Pertamina EP Asset 4 di Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.

Yang terbaru, Pertamina merilis laporan kembali menemukan cadangan migas di sumur Benewangi, Kabupaten Siak, Riau. Pengeboran sumur Benewangi telah dilakukan dan menghasilkan produksi minyak dengan kapasitas 540 barel per harinya.

Khusus pengembangan Benewangi, Direktur Hulu Pertamina Dharmawan Samsu menyebutkan bahwa Pertamina Hulu Energi telah mengidentifikasi beberapa potensi lain di sekitarnya dengan perkiraan sumber cadangan minyak di angka 500 juta barel setara minyak (MBBOE).

“Giant discovery”

Lebih spesifik, potensi cadangan gas bumi Indonesia dapat terdongkrak dengan ditemukannya “giant discovery” di Wilayah Kerja Sakakemang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Repsol yang ditandai dengan pelaksanaan pengeboran Sumur Kaliberau Dalam 2X (KBD2X). Potensi cadangan gas di WK ini diperkirakan sedikitnya 2 triliun kaki kubik (TCF). Penemuan dari sumur KBD2X ini termasuk dalam lima terbesar di dunia pada tahun 2018-2019.

“Kita sangat senang. Mereka (Repsol) baru mengambil alih blok ini di

tahun 2015 dan program mereka langsung tancap gas. Tahun 2017-2018 mereka melakukan eksplorasi dengan tim yang sangat solid, para geologis mereka, membuktikan bahwa reservoir (migas) di Indonesia ada dan terbukti,” ujar Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar di Kementerian ESDM, Kamis (21/2) petang.

Penemuan cadangan ini merupakan kedua terbesar setelah di Blok Corridor. Pemerintah mengharapkan agar di sekitar area Sakakemang dapat ditemukan cadangan migas baru.

“Kalau bisa seluruh basin-nya nanti dianalisa, sehingga kemungkinan kita menemukan cadangan lagi lebih besar. Untuk itu, reservoir engineer silakan gunakan ilmunya, gunakan

pengalamannya untuk melihat lebih luas lagi,” kata Arcandra.

Repsol kembali berinvestasi di Indonesia dan menjadi KKKS sejak tahun 2009 dengan fokus pada aset-aset di wilayah timur Indonesia. Repsol kemudian mengambil Talisman pada tahun 2015. Saat ini Repsol mengelola empat wilayah kerja eksplorasi yaitu East Jabung, Sakakemang, South East Jambi, dan Andaman 3.

Sumur KBD2X mulai ditajak pada 20 Agustus 2018 dengan target fractured basement reservoir. Jenis reservoir ini memiliki potensi hidrokarbon yang menjanjikan, terutama di wilayah Sumatera Selatan. Hal ini terbukti dengan penemuan-penemuan sebelumnya

di wilayah kerja lain, seperti Lapangan Suban dan Sumpal, KKKS ConocoPhillips Indonesia.

Sumur yang berada sekitar 60 kilometer dari lapangan gas raksasa Suban ini, perlu penanganan dan perhatian khusus karena termasuk ke dalam kategori lapangan gas dengan potensi penemuan yang signifikan, dan terbesar di Indonesia dalam kurun waktu dua dekade terakhir.

Dengan koordinasi yang baik, setiap kendala yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik sehingga pada akhirnya sumur ini mencapai targetnya di kedalaman 2.430 meter *measure depth* pada awal Februari 2019 dan telah melakukan tes produksi dengan hasil sementara yang signifikan.

Keberhasilan sumur KBD2X akan membuka eksplorasi dengan target fractured basement di wilayah lain di Sumatera Selatan hingga ke Sumatera Tengah, dan menjadi pemicu semangat dalam melakukan eksplorasi hulu migas yang lebih masif di Indonesia.

Selain Sakakemang, Pemerintah setidaknya mengindikasikan ada 10 wilayah potensi “discovery giant”, yakni North Sumatera (*Mesozoic Play*), Center of Sumatera (Basin Center), South Sumatera (*Fractured Basement Play*), Offshore Tarakan, NE Java-Makassar Strait, Kutai Offshore, Buton Offshore, Northern Papua (*Plio-Pleistocene & Miocene Sandstone Play*), Bird Body Papua (*Jurassic Sandstone Play*), dan Warim Papua.

Timur tetap lebih menjanjikan

Penemuan “giant discovery” di Wilayah Kerja Sakakemang cukup mengejutkan mengingat pencarian cadangan migas sudah ke Indonesia bagian Timur, yaitu daerah Maluku dan Papua, dalam beberapa tahun terakhir. Alasannya, kegiatan eksplorasi migas di Indonesia bagian



Atsy, (Cekungan Sahul), dan Blok Agats Barat (Cekungan Sahul).

Rekomendasi ini semakin diperkuat dengan temuan-temuan lain. Kementerian ESDM dalam siaran pers tanggal 13 September 2018, menyebutkan di Blok Selaru teridentifikasi dua lead pada *Mesozoic deltaic play* dengan sumberdaya potensi gas kurang lebih sebesar 4,8 trillion cubic feet (TCF) dan minyak bumi 4.060 MMBO.

Sementara itu, berdasarkan hasil akuisisi seismik 2D yang dilakukan Badan Geologi pada tahun 2017 sepanjang 1600 km di blok Arafura Selatan, teridentifikasi dua lead. Pertama pada *Aptian Prograding shoreface play* (terbukti terjadi penemuan di Papua New Guinea). Kedua, pada Permian *fluvio-deltaic lacustrine pinchout* (terbukti terjadi penemuan di Australia bagian utara). Potensi gas bumi sekitar 7,36 TCF dan minyak bumi sekitar 6144,54 MMBO. Blok Boka dan Blok Atsy teridentifikasi 4 lead di *Jurassic sand play* dengan potensi gas bumi sebesar 1,1 TCF dan minyak bumi diperkirakan sebesar 930 MMBO. Sedangkan Blok Atsy teridentifikasi 11 lead pada *Paleozoic Rift Graben play* dengan target reservoir batu gamping Formasi Modio dan batu pasir Formasi Tuaba. Diperkirakan total potensi yang terkandung di dalamnya, gas bumi sebesar 0,9 TCF dan minyak bumi 750 MMBO.

Selanjutnya, berdasarkan survei seismik 2D di tahun 2015 yang mengambil target reservoir batu pasir *Neoproterozoic-Cambrian* yang seumur dengan formasi *Bitter Springs* terbukti terjadi temuan reservoir produktif pada Cekungan Amadeus di onshore Australia, teridentifikasi 8 lead pada *Neoproterozoic sand play*, dengan potensi gas bumi sebesar 0,7 TCF dan untuk skenario minyak bumi sebesar 575 MMBO. ●

barat sudah semakin ‘seret’ dan minim dengan temuan cadangan migas.

Hampir seluruh daerah potensial telah terekplorasi dan bilapun ada temuan migas, biasanya relatif kecil. Pandangan tersebut sejalan dengan survei Badan Geologi Kementerian ESDM. Survei umum geologi migas di 30 cekungan periode tahun 2010-2018, menghasilkan rekomendasi eksplorasi di lima wilayah di Kawasan Timur Indonesia. Lima kawasan tersebut memiliki potensi lapangan migas besar (*giant field*), yaitu Blok Selaru (Cekungan Aru-Tanimbar), Blok Arafura Selatan (Cekungan Arafura), Blok Boka (Cekungan Akimeugah), Blok





Upaya Meningkatkan Gairah Investasi Migas

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan gairah investasi migas di tanah air. Skema *gross split*, kerja sama infrastruktur hingga regulasi yang kondusif bagi iklim investasi telah digulirkan.



Seperti tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah tetap mengumumkan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Migas secara terbuka. Pada Kamis (21/2), misalnya, Pemerintah mengumumkan Penawaran WK Migas Konvensional Tahap I Tahun 2019 yang terbuka kepada seluruh Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap pada kegiatan hulu migas.

WK migas yang ditawarkan sebanyak lima WK, terdiri dari dua WK eks produksi, yaitu WK Selat Panjang dan West Kampar serta tiga WK eksplorasi, yaitu WK Anambas, West Ganai, dan West Kaimana.

Seluruh WK tersebut ditawarkan dengan mekanisme Lelang Reguler dan menggunakan skema Kontrak *Production Sharing Contract (PSC) gross split* sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM No. 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*.

Pada lelang ini, Pemerintah menetapkan bahwa terhadap akses Paket Data yang dilakukan oleh peserta lelang yang telah mengakses Bid Document tidak dikenakan biaya atau gratis. Biaya akses Paket Data nantinya hanya dibebankan kepada pemenang Lelang untuk masing-masing WK. Pembebasan biaya akses data ini dilakukan untuk mendorong besarnya partisipasi BU/BUT bidang hulu migas pada lelang WK ini.

Capai US\$ 993,51 juta

Iklim investasi migas sendiri tak sepenuhnya tepat bila dikatakan lesu. Prognosa investasi subsektor hilir migas tahun 2019, misalnya, mencapai US\$ 993,51 juta, terdiri dari investasi bidang pengolahan sebesar US\$ 519,25 juta, bidang pengangkutan sebesar US\$ 54,97 juta, penyimpanan sebesar US\$ 21,68 juta, niaga sebesar US\$ 10,11 juta serta pembangunan LNG untuk PLN di 4 kota sebesar US\$ 387,5 juta.

Investasi bidang pengolahan sebesar US\$ 519,25 juta dengan perincian: pembangunan kilang minyak baru di Tuban sebesar US\$ 105,5 juta, Pertamina *Blue Sky Project* di Cilacap sebesar US\$ 49,5 juta, RDMP IV Cilacap sebesar US\$ 117,5 juta, RDMP V Balikpapan US\$ 233,5 juta dan RDMP VI Balongan US\$ 12,25 juta.

Investasi bidang pengangkutan sebesar US\$ 54,97 juta, terdiri atas Pipa Transmisi Gresik-Semarang US\$ 24,55 juta, Pipa Distribusi Tambak Lorok US\$ 2,09 juta, Pipa Distribusi Kendal US\$ 0,09 juta, Pipa Distribusi Demak 0,22 juta, Pipa Distribusi BOB Siak US\$ 9,92 juta, Pipa Distribusi Kuala Tanjung US\$ 7,85 juta, Pipa Transmisi Duri-Dumai US\$ 5,37 juta, Pipa Distribusi WNTS-Pemping Pipa Distribusi Purwakarta-Subang US\$ 4,88 juta.

Selanjutnya, investasi bidang penyimpanan dengan total US\$ 10,11 juta, terdiri dari PT Rahardja Wirasakti Jaya Mandiri (BBM) di Bangka sebesar

US\$ 5,49 juta, PT Pertamina Patra Niaga, (LPG Depot) di Lombok sebesar US\$ 15,41 juta, dan PT Ghony Persada (LPG SPBE) di Brebes sebesar US\$ 0,78 juta.

Investasi bidang niaga dengan total US\$ 10,11 juta dengan perincian:

- Niaga BBM di Jakarta yaitu PT Petro Energy, PT Walinusa Energi, PT Masinton Dirgantara Petroindo Raya, PT Masinton Abadi Sentosa dan PT Bayu Energi sebesar US\$ 4,33 juta.
- Niaga BBM di Batam yaitu PT Mitra Andalan Batam sebesar US\$ 1,39 juta.
- Niaga BBM di Palu Donggala yaitu Sulawesi Bunker Terminal sebesar US\$ 1,83 juta.
- Niaga Gas Bumi di Jakarta yaitu PT Pertagas Niaga, PT Pertamina Gas, PT Rabana Gasindo Makmur sebesar US\$ 0,89 juta.
- Niaga CNG di Jakarta yaitu PT Delta Prima Gas sebesar US\$ 0,02 juta.
- Niaga CNG di Bandung yaitu PT Migas Hilir Jabar sebesar US\$ 1,38 juta.
- Niaga LPG di Bantul yaitu PT Bintang Buana Energi sebesar US\$ 0,27 juta.

Terakhir, investasi pembangunan fasilitas LNG untuk PLN di 4 kota sebesar US\$ 387,5 juta yaitu Krueng Raya, Nias sebesar US\$ 37,5 juta, MPP NTT sebesar US\$ 150 juta dan Nabire, NTT sebesar US\$ 200 juta.

Kerja sama pembangunan infrastruktur

Pemerintah sudah sejak lama menjalin kerja sama dengan berbagai negara terkait migas. Kerja sama ini antara lain dilakukan dengan negara penghasil minyak serta negara lainnya untuk pembangunan infrastruktur.

Kerja sama negara-negara penghasil minyak dilakukan untuk mendukung jaminan pasokan minyak nasional.

Hal ini mengingat permintaan minyak dalam negeri lebih tinggi dibanding produksi dalam negeri. Selain itu, Pemerintah juga membuka peluang kerja sama dalam pembangunan infrastruktur. Misalnya untuk pembangunan kilang yang bekerja sama dengan Rosneft (Rusia) dan Saudi Aramco (Saudi Arabia). Juga kerja sama dengan Pakistan dan Bangladesh.

Pemerintah juga melakukan kerja sama peningkatan investasi dengan negara-negara seperti Jepang dan Amerika Serikat. Sementara kerja sama peningkatan kapasitas antara lain dilakukan dengan Korea Selatan di mana beberapa PNS di lingkungan Kementerian ESDM mendapatkan beasiswa di Seoul National University.

Pada tahun lalu, Ditjen Migas mencatat ada lima kerja sama migas yang berhasil disepakati dengan sejumlah negara. Dirjen Migas Djoko Siswanto menjabarkan, kerja sama tersebut yakni:

- RI-Rusia: Dengan Rosneft, membangun kilang GRR Tuban dengan nilai investasi US\$ 15-16 miliar
- RI-Arab Saudi: Dengan Saudi Aramco, mengerjakan proyek RDMP kilang Cilacap dengan nilai investasi US\$ 5,4-6 miliar
- RI-Azerbaijan: kerja sama Pertamina dengan SOCAR dalam hal impor minyak mentah dan eksplorasi lapangan migas. Nilai investasinya akan diketahui setelah penandatanganan nota kesepahaman
- RI-Bangladesh dan RI-Pakistan: kerja sama dalam hal pasokan LNG, dengan nilai penerimaan sebesar US\$ 14,3 miliar

“Nanti masih banyak kerja sama lain yang menyusul akan dilakukan,” ujar Djoko kepada media saat dijumpai dalam paparan kinerja subsektor migas, di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (11/1).



Adapun, sebelumnya, terkait kerja sama proyek GRR Tuban, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar memastikan pembangunan proyek kilang Tuban tetap dilakukan di lokasi awal, tidak jadi dipindah ke Situbondo.

Didukung oleh regulasi

Untuk meningkatkan iklim investasi dalam kegiatan usaha niaga migas, khususnya untuk kegiatan niaga umum bahan bakar minyak, Pemerintah pun menyusun berbagai regulasi yang menunjangnya. Salah satunya perlu mengubah ketentuan mengenai persyaratan dalam pengajuan izin usaha niaga umum bahan bakar minyak. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Menteri ESDM Ignasius Jonan tanggal 11 Desember 2018 menetapkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 52

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permen ESDM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 1 aturan ini menyatakan, beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569) diubah, di mana ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf d dihapus dan ayat 6 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi:

1. Izin survei sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. Survei Umum Minyak dan Gas Bumi Konvensional.
 - b. Survei Umum Migas Non Konvensional.
 - c. Survei ke luar Wilayah

Kerja Minyak dan Gas Bumi Konvensional.

- d. Survei ke luar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non-Konvensional.
2. Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b antara lain meliputi kegiatan:
 - a. Pemanfaatan data hasil kegiatan Survei Umum, studi bersama, eksplorasi, dan eksploitasi, untuk tujuan evaluasi dan pengolahan data di dalam negeri atau luar negeri.
 - b. Pemanfaatan data hasil kegiatan Survei Umum, studi bersama, eksplorasi, dan eksploitasi untuk tujuan ilmiah di dalam negeri atau luar negeri.
 - c. Pemanfaatan data hasil

kegiatan eksplorasi, dan eksploitasi untuk tujuan pembukaan data (*disclosed data*) dalam rangka pengalihan interest, termasuk pembukaan data secara virtual.

3. Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi kegiatan:
 - a. pengolahan Minyak Bumi
 - b. pengolahan Gas Bumi
 - c. pengolahan Hasil Olahan d. dihapus.
4. Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi kegiatan:
 - a. penyimpanan Minyak Bumi
 - b. penyimpanan Bahan Bakar Minyak

- c. penyimpanan LPG, LNG, CNG, atau BBG
- d. penyimpanan Hasil Olahan.
5. Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi kegiatan usaha:
 - a. Pengangkutan Minyak Bumi.
 - b. Pengangkutan Bahan Bakar Minyak.
 - c. Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa.
 - d. Pengangkutan LPG, LNG, CNG, atau BBG.
 - e. Pengangkutan Hasil Olahan.
6. Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi kegiatan:
 - a. Niaga Minyak Bumi.
 - b. Niaga Umum Bahan Bakar Minyak.
 - c. Niaga Terbatas Bahan Bakar Minyak.
 - d. Niaga Umum Hasil Olahan.
 - e. Niaga Terbatas Hasil Olahan.
 - f. Niaga Gas Bumi melalui pipa.
 - g. Niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi.
 - h. Niaga LPG, LNG, CNG atau BBG.

Selain itu, ketentuan Pasal 26 huruf d diubah sehingga Pasal 26 berbunyi bahwa jangka waktu usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 sampai dengan ayat 6, sebagai berikut:

- a. Untuk Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 tahun untuk setiap perpanjangan.
- b. Untuk Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 4 paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 10 tahun untuk setiap perpanjangan

- c. Untuk Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 5 paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 10 tahun untuk setiap perpanjangan.
- d. Untuk Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6 paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 tahun untuk setiap perpanjangan.

Perubahan lainnya pada Pasal 38 sehingga berbunyi:

1. Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6 huruf b wajib:
 - a. memiliki sarana dan fasilitas penyimpanan dengan jumlah keseluruhan paling sedikit 1.500 kl (seribu lima ratus kilo liter).
 - b. menguasai/sewa/kerja sama atas sarana dan fasilitas penyimpanan dengan jumlah keseluruhan paling sedikit 1.500 kl (seribu lima ratus kilo liter):
 1. Dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi.
 2. Milik pihak lain secara eksklusif, dengan jangka waktu paling sedikit 10 tahun.
 2. Sarana dan fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dibangun dan/atau dikuasai/ disewa/ dikerjasamakan pada wilayah jaringan distribusi niaga yang ditetapkan.●



Skema

Gross Split

Makin Dilirik Investor

Sejak diberlakukan pada tahun 2017, jumlah kontrak kerja sama migas yang menggunakan skema *gross split* terus bertambah. Hal tersebut menunjukkan bahwa skema *gross split* telah membawa dampak positif terhadap perkembangan investasi migas di Indonesia.

Skema *gross split* sendiri adalah skema di mana perhitungan bagi hasil pengelolaan Wilayah Kerja (WK) migas antara Pemerintah dan kontraktor migas diperhitungkan di muka. Melalui skema *gross split*, negara akan mendapatkan bagi hasil migas dan pajak dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sehingga penerimaan negara menjadi lebih pasti. Selain itu, negara pun tidak akan kehilangan kendali karena penentuan WK, kapasitas produksi dan *lifting*, serta pembagian hasil masih di tangan negara.

Hingga saat ini, tercatat 40 kontrak migas yang telah menggunakan skema ini. Kontrak-kontrak migas tersebut tidak seluruhnya merupakan kontrak baru, melainkan ada pula yang eksisting. Dengan kata lain, skema *gross split* tak hanya menarik

minat investor baru, tapi juga investor eksisting atau terjadi peralihan skema kontrak kerja.

Kontrak *gross split* bertambah terus

Kontrak Kerja Sama (KKS) migas dengan skema *gross split* terus bertambah. Pada Senin (18/2), misalnya, KKS skema *gross split* kembali ditandatangani di Kementerian ESDM, disaksikan oleh Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar. Kontrak yang ditandatangani ini terdiri dari tiga KKS migas konvensional penawaran tahap III tahun 2018 dan 1 amandemen KKS.

Tiga pemenang lelang migas konvensional tersebut telah membayar bonus tanda tangan dan menyampaikan jaminan pelaksanaan komitmen pasti. Nilai total bonus

tanda tangan yang diterima Pemerintah sebesar US\$ 6 juta dan total investasi dari kegiatan komitmen pasti sebesar US\$ 10.950.000.

Tiga kontrak yang ditandatangani tersebut adalah:

1. WK South Andaman
Kontraktor: MP (South Andaman) Holding RSC. LTD.
Bonus tanda tangan US\$ 2 juta dan komitmen pasti berupa G&G (US\$ 150 ribu) dan seismic 3D 500 km² (US\$ 2 juta) dengan total nilai US\$ 2,15 juta.
2. WK South Sakakemang
Kontraktor: Konsorsium Repsol Exploración South Sakakemang S.L.-MOECO South Sakakemang B.V.
Bonus tanda tangan US\$ 2 juta dan komitmen pasti berupa G&G (US\$ 300 ribu) dan seismic 2D 250

3. WK Maratua
Kontraktor: PT. Pertamina Hulu Energi Lepas Pantai Bunyu.
Bonus tanda tangan US\$ 2 juta dan komitmen pasti berupa G&G (US\$ 750 ribu) dan seismic 3D 500 km² (US\$ 5 juta) dengan total nilai US\$ 5,75 juta.

“Dengan adanya tambahan tiga kontrak ini, maka secara keseluruhan dari hasil lelang tahun 2018, terdapat sembilan KKS *gross split* yang ditandatangani,” papar Dirjen Migas Djoko Siswanto belum lama ini.

Sedangkan amandemen kontrak dilakukan pada KKS Sebatik, yang semula menggunakan skema bagi hasil *cost recovery*, dilakukan perubahan menjadi *gross split*. Kontrak ini ditandatangani pada tanggal 7 Oktober 2005 dengan operator Star Energy Sentosa (Sebatik) Ltd. Perubahan skema ini tidak mempengaruhi masa kontrak bagi hasil selama 30 tahun dari tanggal efektif kontrak awal. Adapun luas WK Sebatik saat ini adalah 979,59 km².

Star Energy Sentosa (Sebatik) Ltd. merupakan KKKS kelima yang melakukan amandemen KKS menjadi skema *gross split*. Amandemen KKS menjadi skema *gross split* sebelumnya telah dilakukan oleh Eni East Sepinggan, West Natuna Exploration Ltd, PT. Harpindo Mitra Kharisma dan Dart Energy (Muralim) Pte Ltd.

Sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku, biaya yang sudah dikeluarkan kontraktor pada masa eksplorasi tetap diakui dan diberlakukan sebagai biaya operasi. Dengan penandatanganan tiga WK migas konvensional dan satu amandemen KKS ini, total WK migas dengan skema *gross split* menjadi 40 WK.

“Dengan penandatanganan ini, tercatat total WK yang menggunakan

gross split sebanyak 40 WK. Hal ini semakin membuktikan bahwa investasi migas di Indonesia menarik di mata investor,” ujar Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar.

Dalam kesempatan itu, Wamen Arcandra juga menyatakan bahwa Pemerintah akan meningkatkan pengembangan migas di lepas pantai. Dia menambahkan, proses pengembangan migas di Indonesia saat ini berlangsung sederhana atau *simple*. Semua KKKS diberi tenggat waktu untuk penyelesaian proses.

“Dulu kita di Kementerian selalu dikejar oleh kontraktor untuk mempercepat prosesnya. Tapi mulai tahun kemarin sampai saat ini, kita (Pemerintah) yang selalu mengejar mereka untuk menaati tenggat waktu,” paparnya.

Pemerintah berupaya agar sebulan setelah pengumuman pemenang diumumkan, dapat dilakukan penandatanganan kontrak kerja sama. Diharapkan dukungan dari semua pihak agar proses dapat berjalan

dengan baik dan dipercepat sehingga peluang menemukan cadangan migas baru dapat semakin besar.

Mengapa investor meminati *gross split*?

Bertambahnya blok-blok migas yang mengalihkan skema kontraknya menjadi *gross split*, menurut Arcandra, menunjukkan bahwa sejak diterapkan pada 2017 lalu, skema *Production Sharing Contract (PSC) gross split* telah membawa dampak positif terhadap perkembangan investasi migas di Indonesia. Pemerintah optimis tren positif hulu migas ini terus berlanjut dengan lakunya blok-blok migas yang ditawarkan, baik itu blok baru, maupun blok terminasi.

Arcandra mengungkapkan alasan para investor tersebut mengalihkan kontraknya menjadi *gross split*. Pada umumnya, mereka mempertimbangkan keuntungan menggunakan skema *gross split*, yakni efisien, proses yang tidak berbelit-belit, *simple* (sederhana), dan lebih memiliki kepastian. Selain itu, parameter pembagian insentifnya juga jelas dan terukur.

“Karena alasan-alasan itu mereka mengalihkan kontraknya menjadi *gross split*,” ungkap Arcandra.

Hal senada diungkapkan oleh Djoko. Saat memberi pengarahan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Ditjen Migas yang lolos seleksi penerimaan CPNS Kementerian ESDM tahun 2018, Kamis (21/2), ia menjabarkan, “Skema *gross split* memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan skema *cost recovery* yang sebelumnya diterapkan Pemerintah. Pertama, skema *gross split* memberikan hasil keekonomian yang sama atau bahkan lebih baik dari skema *cost recovery*. Kedua, skema *gross split* akan mempercepat satu sampai dua tahun tahapan pengembangan lapangan migas karena sistem pengadaan yang



mandiri. Ketiga, skema *gross split* mendorong industri migas lebih kompetitif dan meningkatkan pengelolaan teknologi, SDM, sistem dan efisiensi biaya”.

Apresiasi terhadap *gross split*

Sementara itu, lembaga konsultan energi global Wood Mackenzie dalam laporan yang terbit Januari 2019, memberikan apresiasi atas perubahan sistem kontrak bagi hasil migas dari *cost recovery* menjadi *gross split*. Menurut laporan Wood Mackenzie, sistem kontrak *gross split* mendapat sambutan yang positif dari para investor migas. Kebijakan fiskal yang diterapkan oleh sistem *gross split* juga dinilai positif terhadap investasi migas di Indonesia.

“Kami bersyukur, dengan kerja keras kita semua dukungan terhadap sistem *gross split* terus mengalir dan semakin besar. Apresiasi yang diberikan oleh Wood Mackenzie menjadi salah satu bukti bahwa *gross split* sangat kompetitif untuk menarik investasi migas ke Indonesia,” jelas Arcandra di kesempatan berbeda.

Mengutip laporan Wood Mackenzie, Wamen Arcandra Tahar menyatakan bahwa Indonesia bersama India, telah menyelesaikan satu babak di bawah skema bagi hasil migas yang baru, yakni *gross split*.

“Respon dari investor, seperti yang disebut dalam laporan tersebut, adalah cukup baik,” kata Arcandra.

Dalam laporan tersebut, ditampilkan pula 10 blok migas yang telah berakhir masa kontraknya pada tahun 2018, yakni Blok Seram Non-Bula, Salawati Kepala Burung, Bula, Kepala Burung, South East Sumatera, East Kalimantan-Attaka, Offshore Mahakam, Sanga-Sanga, Rimau, dan NSO-NSO Extension. Kesepuluh blok migas tersebut telah berganti skema dari bagi hasil *cost recovery* menjadi *gross split*.



Laporan Wood Mackenzie tersebut memang belum menampilkan keseluruhan blok migas *gross split* tahun 2018. Faktanya, hingga akhir tahun 2018, tercatat 36 WK migas yang menggunakan sistem bagi hasil *gross split*.

Perubahan sistem kontrak ke *gross split* merupakan kebutuhan Indonesia untuk bersaing dengan negara lain dalam menarik investor. Dengan sistem *gross split* di mana proses administrasinya lebih sederhana, biaya investasi efisien dan regulasi yang memberi kepastian, mampu meningkatkan kepercayaan dan keyakinan investor terhadap iklim investasi migas di Indonesia.

Selama 2017-2018, sebanyak 14 wilayah kerja migas berhasil dilelang dengan sistem *gross split*. Kemudian, sejumlah blok-blok migas terminasi yang telah dilakukan perpanjangan kontrak juga menerapkan *gross split*.

“Dari laporan Wood Mackenzie dapat dilihat bahwa minat investor untuk berinvestasi di Indonesia sangat positif. Ketika di banyak negara lain hanya mampu melelang beberapa

blok migas, Indonesia sukses mendapatkan 36 kontrak blok migas dengan *gross split* hingga akhir 2018,” tutur Wamen ESDM.

Arcandra menambahkan, tingginya kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Indonesia juga dapat dilihat dari komitmen mereka untuk membayar komitmen kerja pasti (KKP) dan *signature bonus* yang menjadi bagian dari sistem *gross split*. Dari seluruh kontrak blok migas yang menggunakan *gross split* telah terkumpul dana KKP senilai Rp 31,5 triliun dan *signature bonus* sebesar Rp 13,4 triliun.

Dana KKP itu akan digunakan untuk biaya eksplorasi dan penemuan cadangan-cadangan migas baru dalam lima tahun ke depan sejak kontrak ditandatangani. Dana dari para investor migas tersebut diharapkan akan menjamin eksplorasi dan penemuan cadangan-cadangan migas di berbagai wilayah Indonesia lebih masif. Peralnya selama ini anggaran yang tersedia dari APBN hanya sekitar Rp 60 miliar hingga Rp 70 miliar per tahun. ●

Upaya Menekan Impor Dengan Penyerapan Minyak Mentah Domestik

Impor bahan bakar minyak (BBM) menjadi pilihan yang sulit bagi Pemerintah. Kebijakan tersebut terpaksa diambil mengingat produksi BBM dalam negeri tak sebanding dengan konsumsi masyarakat Indonesia. Meski begitu, Pemerintah terus berupaya untuk mengurangi besaran impor BBM.

Salah satunya melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 42 Tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri. Kebijakan ini mulai membuahkan hasil. Impor minyak mentah dan kondensat selama kuartal I tahun 2019 mengalami penurunan hingga 50%. Hal ini terutama dipengaruhi oleh penyerapan minyak mentah dan kondensat produksi domestik bagian Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

“Volume impor minyak mentah dan kondensat Pertamina pada periode Januari hingga April 2019 mencapai

sekitar 25 juta barel atau turun drastis dibandingkan periode yang sama tahun 2018 yang sekitar 48 juta barel. Penurunan nilai juga berdampak pada penurunan nilai biaya impor sebesar US\$ 1,4 miliar atau ekuivalen lebih dari Rp 20 triliun,” ujar *Vice President Corporate Communication* PT Pertamina (Persero) Fajriyah Usman dalam siaran persnya, Kamis (2/5).

Sudah dapat dipenuhi kilang dalam negeri

Menurut Fajriyah Usman, penurunan impor sangat signifikan karena sebagian dari kebutuhan minyak

mentah untuk kilang-kilang Pertamina sudah dapat dipenuhi dari dalam negeri. “Dengan adanya penyerapan minyak mentah domestik ini, maka sangat mendukung kehandalan suplai untuk kilang-kilang Pertamina sehingga dapat meningkatkan kinerja dan profitabilitas kilang,” ujarnya.

Dalam Permen Nomor 42 Tahun 2018 tersebut dinyatakan bahwa Pertamina dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi wajib mengutamakan pasokan minyak bumi yang berasal dari dalam negeri. Demikian juga kontraktor atau afiliasinya wajib menawarkan minyak bumi bagian Kontraktor kepada Pertamina dan/atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi.



Hingga minggu ketiga April 2019, Pertamina telah melakukan kesepakatan untuk pembelian minyak dan kondensat dalam negeri sebanyak 137 ribu barel per hari (MBCD) yang berasal dari 32 KKKS.

Pembelian minyak dan kondensat domestik yang paling berpengaruh adalah bagian dari eks PT Chevron Pacific Indonesia untuk jenis Duri dan SLC, yang jumlahnya mencapai 2-3 juta barel per bulan.

“Dengan pasokan tersebut, saat ini Pertamina tidak lagi mengimpor minyak mentah jenis *heavy* dan *super heavy* dan hanya mengimpor jenis *light and medium crude*,” ungkapnya.

Kontribusi B20

Selain Permen ESDM Nomor 42 Tahun 2018, kebijakan pencampuran bahan bakar nabati (BBN) berupa biodiesel sebesar 20% atau B20 ke dalam BBM juga memberikan dampak positif terhadap penghematan devisa negara dari impor Solar. Sampai awal tahun ini, kebijakan massif untuk berbagai sektor tersebut mampu menghemat sebesar US\$ 937,84 juta atau setara Rp 13,25 triliun (US\$ 1=Rp 14.137) sejak September 2018 lalu.

Dirjen Migas Djoko Siswanto mengatakan, penyaluran FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) biodiesel selama 2018 mencapai 1,67 juta kiloliter (KL).

“Penyaluran FAME sebesar 1,67 juta KL,” ungkap Djoko melalui keterangan resminya, di Jakarta, Senin (14/1).

Djoko mengatakan, penerapan kebijakan B20 merupakan bukti keseriusan Pemerintah dalam memperhatikan soal ketahanan energi nasional yang juga menjadi masalah serius ke depan, terutama mengurangi dominasi penggunaan bahan bakar fosil.

Di samping kebijakan B20, konversi BBM ke *liquified petroleum gas* (LPG)



juga diterapkan Pemerintah sebagai upaya diversifikasi energi. Total sebanyak 6,55 juta Metrik Ton (MT) LPG bersubsidi dan 0,99 juta MT LPG non-subsidi disalurkan sepanjang 2018 ke 530 SPBE PSO dan 103 SPBE Non-PSO. Penghematan yang didapat dari kebijakan konversi ini selama setahun sebesar Rp 29,31 triliun (*unaudited*).

Kementerian ESDM juga mencatat realisasi penjualan BBM mencapai 67,35 juta KL terdiri dari 16,12 juta KL BBM bersubsidi (Solar, Minyak Tanah dan Premium) serta BBM non-subsidi sebesar 51,23 juta KL. Penjualan tersebut disalurkan ke 6.902 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan milik Pertamina dan PT AKR Corporindo.

Khusus untuk BBM bersubsidi, angka realisasi tersebut hampir mendekati dari total kuota yang dialokasikan dalam APBN 2018, yaitu sebesar 16,23 juta KL. Hal ini tak terlepas dari adanya kewajiban bagi badan usaha untuk penyaluran dan pendistribusian Premium di Jawa, Madura dan Bali melalui Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang diteken pada 23 Maret 2018 lalu.

Sementara itu, untuk BBM non-subsidi, pemerintah akan mengevaluasi penurunan harga jenis BBM tersebut sebulan sekali.

“Kami sedang evaluasi, Pertamina baru saja (menurunkan) kemarin,” jelas Djoko.

Jangka waktu tersebut dinilai tepat bagi Djoko demi menghindari adanya kebingungan di masyarakat.

Harapan besar dari CPO

Muncul harapan besar terhadap hasil sawit untuk mengurangi impor dan meningkatkan ekspor dalam negeri. Indonesia saat ini menjadi negara produsen CPO terbesar dunia dengan produksi 43 juta ton per tahun. Dari hasil produksi tersebut, sebagian dimanfaatkan untuk biodiesel (*biofuel*), yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, tapi juga sebagian diekspor.

Di tahun 2017 saja, konsumsi jenis BBM tertentu (JBT) (solar dan minyak tanah) mencapai 15,04 KL. Dalam satu hari konsumsi solar mencapai 1,7 juta barel, sementara kemampuan produksi minyak siap jual (*lifting*) hanya 803 ribu barel, sisanya 848 ribu barel masih harus impor. Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, Pemerintah pun berinisiatif memanfaatkan CPO menjadi biodiesel sebagai pengganti Solar.

Akhirnya, Pemerintah resmi meluncurkan program B20 pada Oktober 2015, kebijakan pencampuran biodiesel dari sawit sebesar 20%

dengan bahan bakar Solar. Program ini merupakan langkah pemerintah guna mengurangi stok CPO berlebih di dalam negeri serta mendorong ekspor dan mengurangi impor migas, untuk menyetarakan neraca perdagangan.

Lalu, pada Agustus 2018, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan Permen ESDM Nomor 41 tahun 2018, yang mewajibkan badan usaha bahan bakar minyak (BU BBM) menerapkan B20. Mulai 1 September 2018 penggunaan biodiesel pun diperluas untuk sarana transportasi *non public service obligation* (PSO), industri, pertambangan dan kelistrikan.

Pasca *mandatory* B20, impor Solar menunjukkan penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang 2018 impor Solar tertinggi pada bulan Agustus mencapai 693,8 ribu ton, bulan berikutnya impor turun menjadi 313,6 ribu ton di bulan September dan 558,2 ribu ton di bulan Oktober.

Sementara itu, Kementerian ESDM mencatat sepanjang 2018 konsumsi B20 domestik naik 45%, sekitar 3,75 KL dibanding 2017. Pemerintah pun telah mampu menghemat US\$937,84 juta, setara Rp 13,23 triliun (kurs Rp 14.100).

Setelah B20, pemerintah juga merencanakan B30, yang akan dijalankan mulai tahun 2020. Paulus Tjakrawan, Ketua Harian Asosiasi Produsen *Biofuel* Indonesia mengatakan, dengan bauran yang lebih tinggi menjadi 30%, diperkirakan akan mampu menghemat impor BBM mencapai 57 juta barel. Jumlah tersebut setara dengan *lifting* pertamina selama 70 hari kerja.

Kebijakan penggunaan Biodiesel untuk bahan bakar juga membantu menyerap produksi CPO nasional yang saat ini mencapai 43 juta ton per tahun. Di tahun 2017, produksi

CPO mayoritas diekspor dalam bentuk refine, lauric dan oleo, mencapai 53%. Sisanya diekspor dalam bentuk *crude* sebesar 15%, kebutuhan pangan lokal 17%, oleo lokal 1%, biodiesel 5%, dan stok akhir masih ada 9%.

Selama ini pasar ekspor menjadi harapan terbesar produksi sawit nasional. Namun akibat persaingan dagang sawit dengan sumber minyak nabati lain, membuat ekspor produk CPO dan turunannya menjadi tidak bisa dipastikan dan menekan harga menjadi rendah. Dengan peningkatan penyerapan di dalam negeri diharapkan membuat produksi CPO tidak terlalu tergantung dengan pasar ekspor.

Jika B20 menyerap 6,1 juta KL per tahun, B30 diperkirakan akan menyerap sekitar 10 juta ton produksi CPO per tahun, sekitar 23,25% dari produksi CPO nasional. Pemerintah juga menyiapkan B100 atau biodiesel murni untuk bahan bakar. Jika itu terjadi dipastikan dapat menyerap seluruh produksi CPO dan tidak perlu ekspor lagi.

Menuju B100

Pemerintah pun terus melanjutkan langkah strategis terkait pengembangan biodiesel 100% (B100) dari *crude palm oil* (CPO). Hal tersebut

untuk mengurangi ketergantungan penggunaan bahan bakar fosil dengan mendorong penggunaan bahan bakar nabati, yang dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM.

Setelah sukses mengembangkan bahan bakar nabati untuk campuran Solar 20% (B20), Pemerintah secara bertahap akan meningkatkan penggunaan biodiesel secara maksimum hingga 100% atau disebut B100.

Tahun ini, Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM bersama stakeholder akan melakukan uji jalan kendaraan bermotor dengan menggunakan biodiesel 30% (B30) terlebih dahulu.

Ke depannya, pengujian konsorsium melibatkan Puslitbangtek Minyak dan Gas Bumi “Lemigas”, Badan Litbang Pertanian, dan BT2MP-BPPT, dengan mengikuti standar yang sudah disepakati bersama. Koordinasi dan kerja sama ini diharapkan menjadi katalis penggunaan biodiesel pada kendaraan bermotor di Indonesia.

Tapi untuk menuju B100, menurut Paulus memerlukan tahapan yang lebih panjang dan rumit. Untuk dapat digunakan sebagai bahan bakar biodiesel harus menjadi *Hydrotreated Vegetable Oil* (HVO), dan perlu penyesuaian pada mesin yang menggunakan. Tapi dia memastikan untuk B30 hingga B50, sudah dapat langsung digunakan tanpa perlu ada penyesuaian mesin.

Kesuksesan B20 diharapkan menjadi contoh bagi negara lain untuk ikut menerapkannya. Tren penggunaan bahan bakar didunia sendiri saat ini ke arah penggunaan bahan bakar baru terbarukan. Biodiesel sendiri menjadi salah satu pilihan, karena berasal dari tumbuhan yang berkesinambungan, menghasilkan emisi gas rumah kaca yang lebih kecil dan mengurangi polusi. ●





Mendongkrak TKDN Industri Migas

Dalam bidang minyak dan gas bumi (migas), pengutamakan barang dan jasa dalam negeri terwujud dalam Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Penerapan TKDN diharapkan dapat mendukung inovasi produk dalam negeri dengan tetap mempertimbangkan prinsip efektivitas dan efisiensi.

TKDN sendiri merupakan nilai isian dalam persentase dari komponen produksi dalam negeri termasuk biaya pengangkutannya yang ditawarkan dalam item penawaran harga barang maupun jasa. TKDN digunakan salah satunya untuk proyek-proyek *Engineering Procurement & Construction* (EPC), karena untuk pengadaan (*procurement*), banyak mesin dan alat-alat yang bahan bakunya masih berasal dari luar negeri tapi perakitannya dilakukan di dalam negeri. Sementara itu, Pemerintah berharap, untuk proyek-proyek yang akan dilaksanakan, lebih banyak menggunakan bahan dan jasa dari dalam negeri. Untuk itu, maka penilaian penawaran peserta pengadaan barang / jasa tidak hanya dari segi teknis dan harga, tapi juga dari tingkat komponen dalam negeri yang dikandung oleh barang maupun jasa yang ditawarkan.

Menunjukkan tren kenaikan

TKDN dalam kegiatan usaha migas dari tahun ke tahun terus

menunjukkan tren kenaikan. Untuk tahun 2019, TKDN diharapkan mencapai 70%. Dirjen Migas Djoko Siswanto di Jakarta, Rabu (27/2), memaparkan, berdasarkan data Kementerian ESDM, TKDN dalam kegiatan usaha migas tahun 2016 mencapai 49,90%, tahun 2017 naik menjadi 57,83%, tahun 2018 tercatat 63% dan diharapkan pada tahun 2019 dapat mencapai 70%.

“Tahun 2018, TKDN mencapai 63%. Mudah-mudahan tahun 2019 (karena) sudah banyak kewajiban-kewajiban yang kita terbitkan baik aturan maupun surat edaran dan sebagainya, (TKDN) bisa sampai 70%,” katanya.

Untuk meningkatkan TKDN ini, Pemerintah juga memberikan tambahan split hingga 4% bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang menggunakan kontrak bagi hasil *gross split*.

“Kalau TKDN mencapai 70%, berarti kontraktornya bisa dapat (tambahan split) 4% dari *gross split*,” tambahnya.

Setiap tahunnya, Ditjen Migas Kementerian ESDM mengeluarkan Buku APDN (Apresiasi Produk Dalam Negeri) untuk menjadi acuan dalam pengadaan barang dan/atau jasa (*procurement*) pada kegiatan usaha migas.

Pengaturan penggunaan produk dalam negeri bertujuan untuk mendukung dan menumbuhkembangkan produk dalam negeri, sehingga mampu mendukung kegiatan usaha migas. Selain itu, diharapkan mampu memberi nilai tambah bagi perekonomian, menyerap tenaga kerja serta berdaya saing secara nasional maupun internasional. Kebijakan ini juga diharapkan dapat mendukung inovasi produk dalam negeri dengan tetap mempertimbangkan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Djoko Siswanto mengungkapkan, pemanfaatan TKDN juga diharapkan mampu memberi nilai tambah bagi perekonomian, menyerap tenaga kerja serta berdaya saing secara nasional maupun internasional.

Tak hanya itu, kebijakan TKDN ini bisa menjadi peluang bagi dunia usaha. Sebab, kebijakan ini mendorong dunia usaha memproduksi komponen lokal. Kewajiban penggunaan komponen lokal ini sebenarnya juga memberikan keuntungan bagi kontraktor. Pasalnya, Pemerintah memberikan insentif bagi penggunaan komponen lokal lewat skema *gross split*. Semakin tinggi penggunaan komponen lokal, maka semakin besar insentif yang diberikan.

Pembangunan kilang dapat dukung peningkatan TKDN

Peningkatan TKDN, misalnya, dapat dilakukan melalui pembangunan sejumlah proyek kilang pengolahan minyak berkonsep ramah lingkungan yang dibangun PT Pertamina (Persero). Proyek-proyek kilang tersebut adalah Proyek Perluasan (*Refinery Development Master Plan/RDMP*) Kilang Minyak *Refinery Unit* (RU) V Balikpapan, Proyek RDMP RU IV Cilacap, dan Proyek RDMP RU VI Balongan, Proyek RDMP RU II Dumai. Berikut Proyek Pembangunan Kilang Minyak dan Petrokimia (*Grass Root Refinery/GRR*) Tuban serta Proyek Pembangunan Kilang Minyak dan Petrokimia Bontang, Proyek Langit Biru RU IV Cilacap (PLBC), dan Proyek Pengembangan Green Refinery RU III Plaju.

Direktur Megaprojek Pengolahan dan Petrokimia PT Pertamina (Persero) Ignatius Tallulembang mengatakan, melalui program RDMP dan GRR tersebut, Pertamina ikut mendorong kemajuan teknologi kilang dan industri petrokimia di Indonesia.

“Hal tersebut juga mendorong peningkatan TKDN, yang selalu ditekankan oleh pemerintah,” katanya, baru-baru ini.

Tallulembang menambahkan untuk proyek kilang ramah lingkungan yang telah berjalan dan hampir selesai di RU IV Cilacap yakni PLBC, nilai TKDN-nya mencapai 33% dari nilai keseluruhan investasi proyek PLBC sekitar Rp992 miliar.

Sementara itu, untuk RDMP Balikpapan yang telah memasuki fase konstruksi (EPC) diperkirakan nilai TKDN-nya mencapai 35% dari keseluruhan nilai investasi sekitar Rp24 triliun. Dia menambahkan salah satu komponen TKDN yang dipergunakan yaitu pemanfaatan tenaga kerja lokal dan daerah setempat untuk melaksanakan proyek RDMP dan GRR tersebut.

“Saat ini, Pertamina telah melakukan program pelatihan tenaga kerja di Kalimantan Timur untuk mendukung proyek RDMP Balikpapan yang telah dimulai sejak Agustus 2018 dengan total peserta pelatihan tenaga HSE yang telah tersertifikasi BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) mencapai 924 orang,” katanya.

Diimbangi dengan kesiapan ketersediaan komponen dalam negeri

Sebagai informasi, Kebijakan penggunaan produk dalam negeri dalam kegiatan migas sebenarnya tercantum dalam Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi terkait hal tersebut.

Ada pula Peraturan Menteri ESDM No. 15 Tahun 2013 tentang Acuan Penggunaan Produksi Dalam Negeri. Dalam Pasal 4 Ayat 1 aturan itu dinyatakan, setiap kontraktor, produsen dalam negeri dan Penyedia Barang dan atau Jasa yang melakukan pengadaan barang dan atau jasa pada Kegiatan Usaha Hulu Migas, wajib menggunakan, memaksimalkan dan memberdayakan barang, jasa serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri yang memenuhi jumlah, kualitas, waktu penyerahan dan harga sesuai dengan ketentuan dalam pengadaan barang dan atau jasa.

“Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa wajib menggunakan

Buku APDN sesuai acuan untuk menetapkan strategi pengadaan serta menetapkan persyaratan dan ketentuan pengadaan,” bunyi Pasal 4 Ayat 2.

Dorongan penggunaan produk atau komponen dalam negeri melalui kebijakan TKDN dipandang berdampak positif oleh Direktur Eksekutif ReforMiner Komaidi Notonegoro. Namun menurutnya, kebijakan ini harus diimbangi kesiapan ketersediaan komponen dalam negeri yang mumpuni untuk spesifikasi industri, tidak terkecuali bagi migas.

“Tentunya harus diimbangi bahwa barang dan jasa di dalam negeri juga memenuhi spesifikasi yang diperlukan oleh industri,” kata Komaidi Kamis (28/2).

Ia menilai, kendala utama yang kini dihadapi kontraktor migas umumnya masalah harga dan ketersediaan spesifikasi teknis lainnya. Kondisi saat ini menurutnya cukup beragam. Ada beberapa produk atau komponen dari dalam negeri yang sudah cukup memenuhi standar sehingga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan usaha migas. Namun, ada pula yang belum.

Industri migas beserta penunjangnya semestinya bukan lagi dipandang sebagai *profit center* semata. Tata kelola industri migas sebaiknya juga dipandang berdasarkan pemahaman bahwa industri ini juga merupakan infrastruktur utama yang diperuntukan untuk menunjang para pelaku usaha yang berkecimpung di dalamnya, selain tentu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, harapannya *competitiveness* industri migas dapat ditingkatkan sehingga dapat mendukung percepatan program-program sektor migas di masa depan. ●

Pentingnya Pemanfaatan dan Pengolahan Data

Revisi Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 27 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data yang Diperoleh dari Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi merupakan bentuk komitmen Pemerintah untuk mendukung kemajuan iklim investasi di bidang hulu migas, khususnya terkait kebijakan *open data*.

Data migas merupakan milik negara

Dasar pemikiran revisi Permen 27/2006 bahwa data migas merupakan milik negara yang diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yakni data yang dimiliki secara mutlak oleh negara (*absolutely owned by government*) dan data yang terikat dalam sebuah perjanjian (*contracted data*). Berikut pokok-pokok Revisi Permen ESDM No. 27 Tahun 2006:

Sifat Data

- **Terbuka**
Terdiri atas data umum, data dasar (akuisisi), data *processing*, dan data interpretasi yang melewati masa kerahasiaan.
- **Rahasia**
Data yang masih kerahasiaan, data olahan, interpretasi, yang terikat kontrak masih rahasia.

Klasifikasi Data

Data yang dimiliki secara mutlak oleh negara berupa data umum, data dasar, data olahan, data interpretasi yang telah melewati masa kerahasiaan. Data umum dan data dasar dapat diakses oleh siapapun, sedangkan data olahan dan data interpretasi hanya dapat diakses melalui keanggotaan.

Data yang terikat dalam sebuah perjanjian (*contracted data*), berupa data survey umum, data *joint*

study, data KKKS, data pelaksanaan Komitmen Kerja Pasti (KKP) di wilayah terbuka.

Data Survey Umum

Untuk data awal yang berasal dari Pemerintah, pra survey umum merupakan *free akses*. Sedangkan data akuisisi dari survey umum dan data interpretasi, maka keterbukaan data sesuai dengan *term and conditions* (T & C) Kontrak Survey Umum. Selama masa pemasarakatan data, maka akses data B to B. Namun setelah habis masa pemasarakatan, data mutlak menjadi milik negara. Selain itu, untuk *snapshot* hasil survey umum juga merupakan *free akses*.

Data Joint Study

Data awal yang berasal dari Pemerintah Pra *Joint Study* merupakan *free akses*. Sedangkan Data akuisisi *joint study* dan data interpretasi *study* keterbukaan data sesuai T&C *joint study*. Data dapat dimanfaatkan secara eksklusif oleh para pelaksana *joint study* sampai dengan: pelaksana *joint study* tidak melanjutkan proses penawaran langsung WK, atau pelaksana *joint study* tidak ditetapkan sebagai pemenang lelang. Namun, apabila *joint study* ditetapkan sebagai pemenang lelang, maka data menjadi bersifat rahasia sesuai ketentuan kerahasiaan data yang diatur dalam

peraturan perundangan. Selain itu, untuk *snapshot* hasil *joint study* juga merupakan *free akses*

Data KKS

Data awal dari Pemerintah merupakan *free akses*. Sedangkan data E&P KKS dan data olahan interpretasi menjadi data yang dapat diakses oleh pihak lain selama masih dalam masa kerahasiaan sepanjang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. Setelah melewati masa kerahasiaan, maka data mutlak menjadi milik negara.

Data Komitmen Kerja Pasti (KKP)

Dapat diakses oleh pihak lain setelah melewati masa kerahasiaan.

Akses Data

- **Akses data melalui sistem keanggotaan**
Anggota, keanggotaan mendapatkan akses penuh atas seluruh data yang bersifat tidak rahasia dan data yang telah melewati masa kerahasiaan;

Non-anggota, dapat mengakses data umum dan data dasar yang bersifat tidak rahasia dan/ atau yang telah melewati masa kerahasiaan.

Data Amnesty

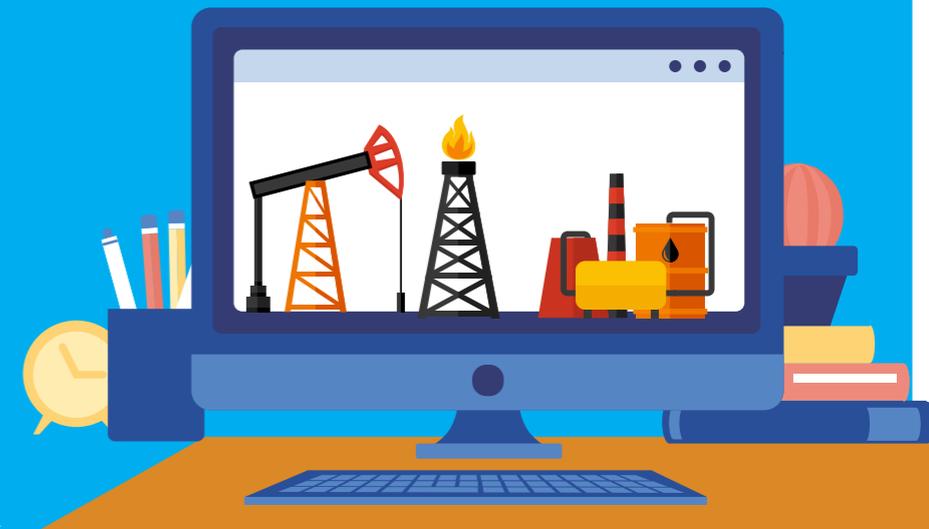
Pengaturan mengenai amnesti data yang dikuasai oleh kontraktor atau pihak lain, baik di dalam maupun di dalam negeri dan belum tercatat. Diberikan waktu 1 (satu) tahun untuk masa amnesti sejak ditetapkan Peraturan Menteri yang baru.

Dalam Revisi Permen 27, pengaturan mengenai amnesti adalah:

- 1) Kontraktor atau pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri yang menguasai seluruh atau sebagian data yang belum tercatat wajib melaporkan kepada Pusdatin ESDM paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.
- 2) Seluruh atau sebagian data yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan kepada Pusdatin ESDM paling lambat 1 (satu) tahun sejak pelaporan.
- 3) Dalam hal seluruh atau sebagian data tidak dilaporkan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau tidak diserahkan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kontraktor atau pihak lain dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pelaksanaan penyerahan seluruh atau sebagian data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.
- 5) Pihak yang menyerahkan seluruh atau sebagian data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memanfaatkan salinan seluruh atau sebagian data yang telah diserahkan.

Data menjadi infrastruktur

Industri hulu migas memasuki babak baru, yakni dengan perubahan paradigma pengelolaan dan pemanfaatan data hulu migas. Sebelumnya, data hulu migas merupakan komoditas Penerimaan



Negara Bukan Pajak (PNBP). Ke depan, data menjadi infrastruktur, sekaligus pendorong kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas dalam rangka percepatan penemuan cadangan migas yang baru.

Terkait hal ini, Pemerintah berencana menggratiskan Data Umum dan Data Dasar Migas untuk dapat diakses secara luas oleh investor. Meski demikian, pembukaan akses data migas ini ditegaskan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar tidak akan melepaskan kontrol negara atas data tersebut.

“Semua pihak diberikan kesempatan *free akses* untuk data umum dan data dasar yang telah melewati masa kerahasiaan. Data adalah milik negara, ada entitas yang boleh mengelola tapi dasarnya adalah milik negara. Dalam hal Pemerintah membutuhkan data tersebut, maka semua pihak wajib memberikan akses,” ungkap Arcandra pada acara diskusi Revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Yang Diperoleh Dari Survei Umum, Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi dengan *stakeholders*, Senin (29/4), di Kementerian ESDM.

Revisi Permen 27/2006 merupakan bentuk komitmen Pemerintah untuk mendukung kemajuan iklim investasi di bidang hulu migas, khususnya terkait kebijakan *open data*.

“Keterbukaan akses data ini diharapkan dapat menarik para investor untuk dapat berinvestasi pada Wilayah Kerja Migas di Indonesia,” ungkap Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Mustafid Gunawan dalam kesempatan yang sama.

Investor lebih leluasa

Dirjen Migas Djoko Siswanto mengatakan, pembebasan biaya akses data WK atau blok migas yang dilelang membuat calon investor lebih leluasa dalam mengikuti lelang. Prospek investasi migas tahun 2019 sendiri diproyeksikan bakal makin bergairah. Indikasi awalnya terlihat dari animo para investor migas dalam mengakses dokumen penawaran lima WK Migas Konvensional Tahap I Tahun 2019 yang ditawarkan sejak awal tahun ini.

“Belum sebulan ditawarkan, namun sudah banyak yang berminat. Terlihat dari adanya 11 perusahaan yang mengakses *bid document*,” ujar Dirjen Migas Djoko Siswanto, Senin (11/3).

Berdasarkan data Senin (11/3), menurut Djoko, sudah ada 11 perusahaan yang mengakses *bid document*. Ini belum ada sebulan sejak Kementerian ESDM mengumumkan penawaran lelang regular lima WK Migas Konvensional Tahap I Tahun 2019 pada 22 Pebruari 2019 lalu. Terdiri dari dua WK Eks Produksi dan tiga WK Eksplorasi, dan ditawarkan dengan sistem fiskal baru yakni bagi hasil *gross split*. ●

“Investasi meningkat akan membawa *multiplier effect*”

Soerjaningsih
Direktur Pembinaan Program Migas Kementerian ESDM

Daya saing minat berinvestasi pada sektor minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia tahun 2018 menunjukkan grafik yang makin kompetitif. Berdasarkan laporan Petroleum Economics and Policy Solution (PEPS) Global E&P Attractiveness Ranking, Indonesia menduduki peringkat ke-25 dari penilaian terhadap 131 negara. Catatan ini membuktikan tata kelola sektor migas mampu memikat para investor yang ingin masuk ke Indonesia.



Meski begitu, catatan di atas tak harus membuat kita terlena. Investasi migas perlu dan harus terus ditingkatkan. Belum lama ini, Jurnal Migas mewawancarai khusus Direktur Pembinaan Program Migas Kementerian ESDM Soerjaningsih untuk menjabarkan panjang-lebar tentang investasi migas di tanah air.

85% vs 75%

Soerjaningsih membuka perbincangan dengan target lifting migas di tahun 2019. Ia mengungkapkan, target minyak bumi tahun ini adalah 775 ribu barel per hari (bph), sedangkan gas bumi 1.250 bph. Target *lifting* migas tersebut, menurut Soerjaningsih, akan terkait dengan penerimaan negara. Target negara, lanjutnya, ditafsirkan sebesar Rp234,73 triliun.

“Oleh karena itu, kita harus menetapkan formula harga minyak Indonesia yang saat ini mengacu kepada *Dead Brain ± Alpha*. Alpha-nya ini tergantung dari kualitas minyaknya itu sendiri. Kemudian, bila harga minyak naik, maka turut memperbesar penerimaan negara,” ujarnya.

Sementara itu, Soerjaningsih mengungkapkan, “Investasi sektor migas tahun ini kita targetkan US\$13,42 miliar. Sebenarnya, kalau dari laporan badan usaha investasi itu nilainya sekitar US\$15,750 miliar. Tapi kita punya sejarah selama 10 tahun terakhir investasi migas itu rata-rata hanya 75% diambil dari laporan badan usaha”.

Tapi, atas arahan Menteri ESDM, Soerjaningsih meneruskan, dibuatlah

prognosa investasi yang kira-kira mendekati real. Simulasi statistik pun digelar.



Simulasi statistik yang kita gunakan ketepatannya mencapai 99%. Dengan menggunakan simulasi ini, maka kita usulkan target investasi US\$13,42 miliar,

Soerjaningsih
Direktur Pembinaan Program Migas
Kementerian ESDM

Target investasi yang sebesar US\$13,42 miliar, tambah Soerjaningsih, harus menimbulkan *multiplier effect* terhadap kegiatan usaha penunjang migas.

“Oleh karena itu, kita melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kemampuan usaha penunjang agar supaya benar-benar dimanfaatkan pada kegiatan usaha migas. Misalnya, penerapan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang tahun lalu mencapai 63%. Kita harapkan di tahun 2019 bisa naik,” paparnya.

Soerjaningsih menyampaikan, ada perbedaan karakteristik dalam menerapkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) antara proyek migas di darat dan laut dalam. Kalau proyek di daratan, katanya, telah banyak menerapkan TKDN. Beda halnya dengan laut dalam yang teknologinya masih banyak yang impor.

Selain itu, tambah Soerjaningsih, investasi migas juga ditujukan untuk pengembangan infrastruktur.

“Tugasnya Direktorat Pembinaan Program (Migas) adalah untuk menyusun rencana induk infrastruktur jaringan transmisi dan distribusi gas bumi. Tidak hanya jaringan, tapi juga rencana induk infrastruktur gas bumi nasional, termasuk nanti pemanfaatan *virtual pipeline*, khususnya di Indonesia Timur,” jelasnya.

Menyinggung hilir migas, sambung Soerjaningsih, seperti proyek-proyek *Refinery Development Master Plan (RDMP)*, *grassroot* dan sebagainya, masih dalam tahap *feasibility study (FS)*.

Untuk pengangkutan, kata Soerjaningsih, juga diprogramkan pipa transmisi dan distribusi di Kendal, Demak, dan Kuala Tanjung.

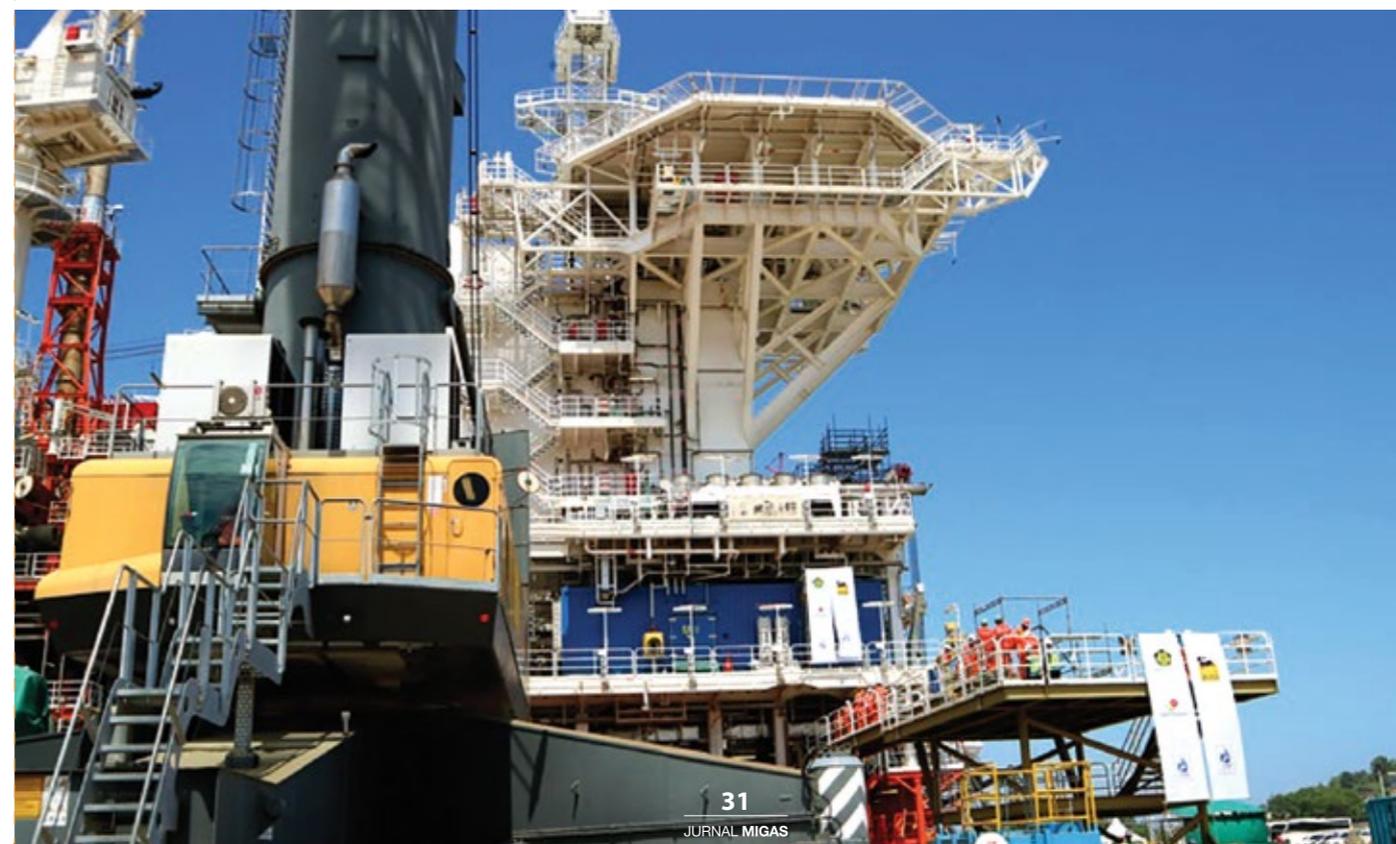
“Ya, kalau untuk pengangkutan melalui pipa yang tercatat di kami adalah program-programnya dari Pertamina dan PGN. Sekarang kan Pertamina dan PGN sudah bergabung ya,” ungkapnya.

Kalau program untuk penyimpanan, lanjut Soerjaningsih, juga ada, termasuk jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga (*jargas*) dan BBM satu harga.

Soerjaningsih menekankan, Direktorat Pembinaan Program Migas juga berkewajiban menyusun Renstra Ditjen Migas. Tujuannya untuk mendukung program-program ketahanan energi.

“Kita menyusun Renstra ke depan itu yang akuntabel. Target ketahanan energi yang kita susun sekarang adalah untuk tahun 2020-2024 yang mengacu pada RUEN. Dari RUEN itu kita turunkan. RUEN itu *energy mix* dari minyak ke yang lain-lain,” ujarnya.

“Yang menjadi target Direktorat Jenderal Migas yaitu kepehaman energi dari subsektor migas itu bisa dilaksanakan seluruhnya oleh unit-unit yang ada di Ditjen Migas,” tegasnya.





Memfasilitasi kebutuhan badan usaha

Kemudian lebih lanjut Soerjaningsih menyampaikan faktor eksternal. Menurutnya, pengaruh faktor eksternal juga besar untuk mewujudkan ketahanan energi. Oleh sebab itu, pihaknya juga memfasilitasi berbagai program yang bertujuan mendorong faktor eksternal untuk mencapai ketahanan energi.

Terkait kerjasama dengan pihak eksternal, Soerjaningsih mengapresiasi berbagai jalinan kerjasama yang sudah terjalin. Ia mencontohkan, Pertamina yang bekerja sama dengan perusahaan asal Irak untuk mengelola lapangan migas di Irak. Begitu pula kerjasama antara Pertamina dan Rosneft untuk pembangunan kilang di Tuban. Kemudian, Pertamina dengan Saudi Aramco untuk pembangunan kilang di Cilacap.

“Sekarang, kita juga mendorong atau memfasilitasi negosiasi antara Pertamina dengan Pakistan dan Bangladesh untuk pasokan LNG. Perkiraan nilai investasi total sekitar US\$14,3 miliar,” tambahnya.

Terkait kerjasama-kerjasama tersebut, Soerjaningsih mengaku, juga akan memfasilitasi berbagai

kebutuhan Pertamina sebagai perusahaan migas pelat merah. Sejumlah kebutuhan tersebut meliputi pendanaan, pembebasan lahan, pajak, dan insentif. Ia tak memungkir, tantangan pembangunan kilang migas hampir dipastikan pada soal-soal yang disebutkan tadi.

“Seperti fungsi-fungsi Pemerintah, memfasilitasi apa-apa yang dibutuhkan oleh badan usaha, termasuk tahun ini kita juga ikut memfasilitasi pembangunan infrastruktur gas bumi,” ujar Soerjaningsih.

Tak hanya itu, Soerjaningsih menyampaikan, Pemerintah juga tengah berupaya merevisi Perpres No. 146 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengembangan dan Pembangunan Kilang Minyak di Dalam Negeri. Tujuannya untuk mempercepat pembangunan kilang minyak baru (*Grass Root Refinery*) dan pengembangan kilang minyak (*Refinery Development Master Plan/ RDMP*).

“Pemerintah memfasilitasi Pertamina yang mendapat penugasan untuk membangun kilang minyak baru dan RDMP. Dengan adanya revisi ini, diharapkan pembangunan kilang dapat berjalan lancar,” tuturnya.

Ia melanjutkan, dalam Perpres sebelumnya, hal-hal tersebut juga telah diatur. Namun dalam pelaksanaannya ternyata masih belum cukup untuk mempercepat pembangunan kilang minyak. Pihak Pertamina sendiri, kata Soerjaningsih, menilai revisi tersebut cukup untuk mendorong pembangunan kilang.

“Pertamina sudah *firm* dengan Perpres itu mereka sudah bisa jalan,” ia mengaku.

Menyinggung *small scale* LNG, Soerjaningsih menjelaskan, Pemerintah menargetkan akan membangun kilangnya di tahun ini dengan nilai total investasi S\$387,5 juta.

Berbagai terobosan yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan investasi di sub sektor migas perlu mendapat dukungan banyak pihak. Pasalnya, investasi migas yang berhasil akan turut pula dirasakan dampaknya oleh masyarakat luas.

“Investasi meningkat akan membawa *multiplier effect*. Jaminan terhadap *lifting* akan tercapai. Ketahanan energi meningkat. Lalu, pembangunan infrastruktur juga berjalan,” jelas Soerjaningsih. ●

Upaya Membangun Kilang yang Terintegrasi

Upaya peningkatan produksi dan kapasitas pengolahan minyak bumi di Indonesia kian mendesak. Pasalnya, kebutuhan akan minyak bumi telah melampaui pasokannya di dalam negeri. Cadangan minyak bumi di dalam perut Ibu Pertiwi pun diprediksi hanya tinggal belasan tahun lagi. Berharap impor terus pun hanya akan menggerus APBN.

Pemerintah Indonesia menyadari hal ini dan tak tinggal diam. Bersama dengan sejumlah stakeholder, Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kapasitas minyak bumi Indonesia. Salah satunya melalui perusahaan minyak dan gas bumi (migas) pelat merah terbesar di tanah air, PT Pertamina (Persero).

Seperti apa langkah konkret tersebut? Bagaimana pula merealisasikannya? Berikut adalah pemaparan dari Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia (MP2) Pertamina Ignatius Tallulembang dalam sesi wawancara khusus dengan Jurnal Migas baru-baru ini.

Empat upgrading dan dua kilang baru

Ignatius bercerita, Direktorat MP2 masih terbilang baru, terbentuk sekitar dua tahun lalu. Ia merupakan pimpinan direktorat tersebut yang keempat. Ignatius menuturkan, tugas dan fungsi direktorat yang dipimpinnya ini adalah turut membangun ketahanan dan kemandirian energi.

Ignatius Tallulembang
Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia (MP2) PT Pertamina (Persero)



Ignatius menjabarkan, pada tahun 2017, kebutuhan fuel Indonesia ialah sekitar 1,4 juta barel per hari (bph). Kebutuhan fuel tersebut mencakup *gasoline*, solar, dan avtur.

“Sementara itu, produksi fuel kita sekitar 670, 680, atau hampir 700 ribu bph. Hampir separuhnya itu kita impor. Kita tahu dengan importir ini kan mempunyai multiplier effect ya. Dampaknya menggerus devisa. Kemudian, juga akan berdampak kepada kurs, kekuatan atau ketahanan rupiah terhadap mata uang asing. Itulah makanya namanya kemandirian energi sangat penting, menuju zero import, tidak ada impor. Itulah saya

kira yang menjadi dasar kenapa dibentuk direktorat baru,” ungkapnya.

Jadi, ia melanjutkan, bagaimana Indonesia membangun kemandirian dan ketahanan energi nasional? Ia menjawab, caranya dengan membangun infrastruktur kilang, termasuk petrochemical dalam satu paket yang terintegrasi.

Oleh sebab itu, tambahnya, Pertamina berencana akan membangun empat upgrading kilang existing. Itulah yang disebut *Refinery Development Master Plan (RDMP)*.

“Jadi, ada empat kilang existing yang akan kita tingkatkan kapasitasnya. Kita akan modernisasi dari sisi infrastruktur kilangnya. Kita akan meningkatkan kualitas produknya yang selama ini Euro 2, bahkan ada yang di bawah Euro 2, menjadi setara Euro 2004, bahkan Euro 5,” ujarnya.

Kilang mana sajakah yang termasuk RDMP tersebut? Ignatius menjelaskan, keempat kilang RDMP itu adalah Balikpapan, Cilacap, Balongan, dan Dumai.

“Balikpapan yang prioritas karena dari sisi kesiapan *engineering* paketnya sudah jadi. Kemudian, juga dari sisi keekonomian *project*-nya juga sangat menarik, atraktif sehingga memang ini kita dahulukan,” terang Ignatius.

Untuk Kilang Dumai, masih menurut Ignatius, juga akan dibangun bio-refinery.

“Keempat kilang ini kita upgrade. Kita tingkatkan kapasitas, perbaiki kualitasnya, dan juga meningkatkan

profitabilitas serta *valuable product yield*-nya,” tegas Ignatius.

Selain RDMP, ia meneruskan, Pertamina juga akan membangun dua kilang baru yang disebut *Grass Root Refinery* (GRR).

“Di mana sajakah? Pertama di Tuban dan (kedua) Bontang. Masing-masing (kapasitasnya) 300 ribu bph. Dengan empat RDMP dan dua GRR ini, kita akan meningkatkan kapasitas kilang kita menjadi 2 juta bph *crude* yang akan diproses dari kapasitas terpasang saat ini, yakni 1 juta bph, dua kali lipat,” Ignatius mengungkapkan.

Tak sekadar meningkatkan kapasitas atau membangun kilang baru, lanjut Ignatius, Pertamina juga akan mengolah *crude* yang kandungan sulfurnya lebih tinggi.

“Jadi, kita punya fleksibilitas mengolah *crude* dari berbagai macam *crude*. Seperti diketahui, kilang kita saat ini hanya dirancang atau didesain untuk mengolah *crude* domestik yang kandungan sulfurnya rendah, yang kita sebut juga *sweet crude*, kandungannya 0,2%. Dengan RDMP nanti ini kita akan meningkatkan kemampuannya sehingga mampu mengolah *crude* dengan kandungan sulfur lebih tinggi yang disebut *sour crude* sampai dengan 2%,” ia menjabarkan.

“Lalu, kita juga akan meningkatkan *yield* produk yang bernilai jual tinggi itu dari kondisi sekarang sekitar hanya sekitar 75%-76% akan naik menjadi 95%-96%,” lanjutnya.

Jadi, Ignatius berujar, total produksi *fuel* dalam negeri nantinya bisa menyentuh angka 1,7 juta bph atau sekitar tiga kali lipat dibandingkan produksinya saat ini.

Selain *fuel*, Pertamina juga akan mengembangkan produk petrokimia. Melalui RDMP dan GRR ini, Pertamina akan meningkatkan kapasitas produksi

petrokimia dari sekitar 600.000 ton per tahun saat ini menjadi 6,6 juta ton per tahun.

“(Naik) 10 kali lipat daripada kapasitas petrokimia saat ini,” ia menekankan.

On time, on budget, on specifications, on return, dan on regulation.

Keenam proyek di atas termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam kurun waktu 2019-2026. Mengembangkan dan membangun enam kilang minyak bumi dan petrokimia secara terintegrasi dalam waktu berdekatan memang bukan pekerjaan ringan. Ignatius mengamini hal ini. Meski begitu, pihaknya bertekad mengatasi berbagai tantangan yang menghadang.

“Dalam membangun infrastruktur yang sebesar ini, tantangan utamanya adalah bagaimana kita mengelola proyek ini untuk mencapai target yang kita sebut ‘otobosoror’. Jadi itu adalah objektifnya, bagaimana membangun kilang *on time, on budget, on specifications, on return, dan on regulation*. Yang paling penting lagi sebenarnya adalah bagaimana *zero accident* menjadi prioritas utama kita dalam pengelolaan proyek apapun,” kata Ignatius.

“Strateginya di Direktorat MP2, bagaimana membangun sadar HSSE sebagai *way of life*? Kita coba memasukkan unsur HSSE sejak awal *planning*, termasuk tahapan konstruksi,” bebernya.

Tantangan berikutnya, tambahnya, adalah dalam hal pendanaan dan ketersediaan sumber daya manusia (SDM).

“Untuk membangun empat RDMP dan dua GRR tadi itu membutuhkan dana yang sangat besar US\$40-50 juta. Artinya, tantangannya ialah bagaimana membiayai proyek infrastruktur yang begitu besar.



Oleh karena itu, kita mencari partner strategis dalam membangun kilang, baik itu dalam penyediaan dana, *crude, resources*, atau teknologi yang dibutuhkan,” ungkapnya.

Terkait soal SDM, Ignatius memperkirakan, akan dibutuhkan sekitar 170.000 tenaga kerja untuk total empat RDMP dan dua GRR. Jumlah tenaga kerja tersebut meliputi *unskilled dan skilled labor*.

“Khusus Kilang Balikpapan yang akan kita kerjakan duluan, kita perkirakan sekitar 20.000 sampai 25.000 pekerja yang terlibat. Untuk operasinya sehari-hari nanti bisa sekitar 1.000 sampai 1.500 tenaga kerja,” ujarnya.

Ia meneruskan, “Tantangan lainnya bagaimana memilih partner strategis, kontraktor hingga subkontraktor yang tepat. Prinsipnya adalah mutual benefit. Jangan merasa mau menang sendiri. Jadi, kita harus mencari partner yang bersama-sama nanti membangun suatu perusahaan, perusahaan patungan. Nah, kita cari partner yang tepat, misalnya memiliki kemampuan pendanaan atau penyediaan *crude*”.

Tak hanya itu, Ignatius juga tak menepikan pengelolaan stakeholder dan shareholder sebagai tantangan tersendiri. Menurutnya, *stakeholder* Pertamina sangat banyak, misalnya Pemerintah, lembaga yudikatif, eksekutif, pemerintah daerah (pemda), bahkan seluruh masyarakat Indonesia.

“Bagaimana mengelola semua ini? Katakanlah saja untuk menyiapkan penyediaan lahan, kita memerlukan dukungan dari setiap *stakeholder*. Bagaimana meyakinkan masyarakat dengan prinsip *win-win*, legowo, agar masyarakat dapat merasakan manfaat. Membangun *good relationship*, komunikasi, rutin kami mengunjungi *stakeholder* untuk memberi penjelasan,” jelasnya.

Ignatius menyadari pentingnya pengelolaan *stakeholder* dan *shareholder* bagi keberhasilan pembangunan RDMP dan GRR. Dukungan Pemerintah, misalnya, diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut.

Dukungan Pemerintah tersebut bisa berupa insentif *tax holiday*, pembebasan bea masuk untuk impor mesin serta barang produksi, pembebasan seluruh PPH untuk proses *spin off* dan sebagainya. Dukungan Pemerintah seperti itu, Ignatius mengaku, telah diakomodir oleh Pemerintah.

Tak hanya Pemerintah, tentu segala upaya untuk meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi memerlukan dukungan banyak pihak. Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah agar upaya tersebut bukan lagi sekadar mimpi, tapi sesuatu yang realistis dan layak diperjuangkan. ●



“Kita bisa efisien tanpa mengorbankan *safety* dan juga kinerja tetap baik”

John Anis, General Manager PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM)

PT Pertamina (Persero) resmi menjadi pengelola Blok Mahakam per 1 Januari 2018 seiring dengan kegiatan serah terima dari Total E&P Indonesia (TEPI). Sebelumnya, Blok Mahakam yang berada di Kalimantan Timur ini telah dikelola TEPI & Inpex selama 50 tahun. Kemudian pada awal tahun 2018, Blok Mahakam dikelola oleh PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) yang merupakan cucu perusahaan Pertamina.



Lantas, sejauh mana perkembangan terkini blok migas tersebut? Bagaimana pula upaya PHM untuk setidaknya mempertahankan kinerja positif dalam mengelola Blok Mahakam? Berikut adalah penjelasan dari Jhon Anis saat ditemui belum lama ini.

Mempertahankan decline rate

Secara global, Ia menuturkan, tidak ada perbedaan signifikan terhadap pengelolaan Blok Mahakam, baik sesudah maupun sebelum dikelola oleh PHM. Hal ini, misalnya, dilihat dari para pekerjanya.

“Statistiknya, sebanyak 98% para pekerjanya sudah bekerja di Blok Mahakam sebelum peralihan. Lalu, 2% ke mana? Kebanyakan itu ada yang pensiun, ada yang mau urusan keluarga dan lain sebagainya. Boleh bilang hampir semuanya gabung ke PHM,” katanya.

Hal identik juga ditemui dalam soal *best practice*, termasuk *safety*. Tapi, apakah tidak ada *best practices* baru yang berasal dari Pertamina?

“Tentu saja ada. Kita kombinasikan, contohnya HSE *management system*. Kita sesuaikan dengan apa yang ada di Pertamina. Selama ini, kita pakai sistem yang ada di Total. Pada dasarnya sama, fondasinya sama. Tapi, kita kombinasikan dengan ISRS versi 8 yang kebetulan dapat level 8 yang menjadi level tertinggi di tahun pertama beralihnya Blok Mahakam ke PHM. Hal ini menunjukkan HSE *management system* kita sudah cukup baik. Tantangan kita bagaimana meningkatkan, minimal mempertahankannya ke depan?” lanjutnya.

Hal lain yang diadaptasi oleh PHM, tambahnya, adalah soal proper.



“*Alhamdulillah*, dulu kita biru semua, dua lapangan hijau. Tahun ini targetnya tiga lapangan hijau. Tujuannya nanti adalah mendapatkan emas. Ini sedikit kompleks karena ternyata kita bagi dari enam lapangan. Jadi, nanti enam proper. Enam proper ini punya kelebihan dan kekurangannya,” ungkapnya.

Lebih lanjut Jhon memerinci, Lapangan SPS dan Bekapai telah mendapat proper hijau.

“Yang lain bagus juga. Tapi mungkin ada masalah administrasi, persiapan dokumentasi dan lain sebagainya, masih akan dilengkapi,” katanya.

Lebih jauh dia menyampaikan, lapangan migas yang dikembangkan oleh PHM tidak ada yang sifatnya baru.



Kami menyebutnya sudah di daerah 3P. Artinya yang belum terbukti proven ada atau tidak. Nah, pengembangan lapangan baru di luar itu tidak ada. Hanya ada komitmen dua eksplorasi. Dua *exploration well*. Itulah yang diminta. Jadi, di WK eksisting kita harus melakukan dua eksplorasi. Itu sudah kita lakukan. Kita sudah studi. Ada enam prospek. Tiga lokasi kelihatannya menarik, yakni di Peciko, Tunu, dan Manfatu. Ada satu lagi yang menarik, yaitu Antam,”

John Anis, *General Manager* PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM)

Menurutnya, ketiga lapangan tersebut produksinya tidak besar, masih dibawah 100 BCF.

Kondisi Blok Mahakam sebetulnya sudah masuk ke tahap yang sudah melewati fase plato. Jadi, penurunan produksinya terjadi secara alamiah.

“Dengan kata lain, sebetulnya pada saat diambil oleh Pertamina ini memang di posisi yang menempati decline. Jadi, pertanyaannya adalah pada saat kita *decline* ini, kita telah mempertahankan *slop*-nya, mempertahankan *rate*-nya. Tahun 2018, kita berhasil mempertahankan *decline rate* totalnya sekitar hanya 20%. Sebelumnya itu hampir 35% di tahun 2017. Bahkan di tahun 2019, kita berharap itu hampir 0% mungkin antara 0% sampai 5% *decline rate*-nya,” paparnya.

Artinya, bila pihaknya tak melakukan berbagai upaya pengendalian, hanya memproduksi, maka *decline rate*-nya bisa mencapai 50%.

Kontribusi bagi negara

Menyadari betapa pentingnya dukungan dari Pertamina dalam menjaga kinerja PHM, terutama dari segi investasi. Pada tahun 2019, nilai investasi yang dimaksud sekitar US\$1,75 miliar.

“Bentuknya kan tidak selalu uang, bisa dalam bentuk motivasi. Bekerja juga lebih lebih semangat lagi dan juga karena kita berkontribusi terhadap mereka,” katanya.

Dukungan investasi ini pula yang turut berdampak terhadap meningkatnya target eksplorasi sumur oleh PHM di tahun 2019.

“Kalau tahun lalu kita hanya bisa sekitar 62 sumur, maka tahun ini sekitar 118 sumur. Nanti kita lihat lah,” ujarnya. Ia meneruskan, “Pengeboran pun kita lakukan lebih efisien dari

sebelumnya. Ini juga bukan karena hanya masalah kita ingin lebih baik. Kita juga dituntut lebih baik. Jadi, memang mau tidak mau kita harus lebih efisien dari sebelumnya karena *resource*-nya kecil-kecil. Efisiensinya bagaimana? Jadi dengan teknologi. Kita lihat, misalnya, *compression*-nya bisa tidak diganti dengan *compression* yang lebih sederhana? Bisa tidak pekerjaan yang tadinya itu seri kita bikin paralel?”

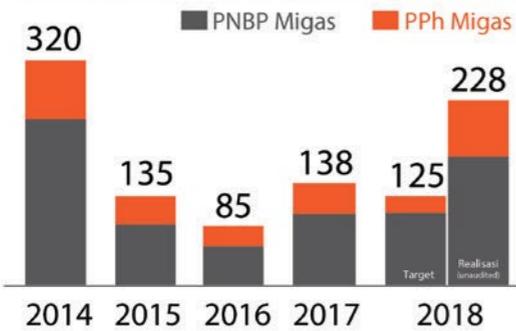
Jhon juga memperhatikan baseline. Ia berujar, “Kita juga harus mempertahankan baseline. Kita maintain caranya bagaimana, misalkan, dengan konfigurasi network mengurangi depressor? Terus ada yang disebut sibu (shut in built up). Itu salah satu juga terobosan dari teman-teman”.

“Karena kita harus lebih efisien dan kita juga tahu bahwa ekspektasi untuk produksi itu memang tinggi dan sulit dicapai, maka kita tetap berusaha semaksimal mungkin apa yang bisa lakukan. Semua yang bisa kita lakukan, kita lakukan,” tambahnya.

“Kita kan harus memastikan bahwa operasional kita *excellent*. Artinya *perfect*. Itu jangan sampai terus produksi, *safety*-nya hancur, keuangan hancur. *Alhamdulillah* saya senang dengan apa yang dilakukan dengan teman-teman safety tinggi. Kalau melihat dari laporan, dibandingkan dengan perusahaan di luar negeri ada beberapa poin kita tuh lebih tinggi daripada mereka. *Alhamdulillah* bagus (juga) dari segi keuangan. Kami pun mengontrol keuangan. *Cost recovery* kita turunkan hampir sekitar 25%, 30%. *Government tax* itu bisa naik sekitar 60%. Kita akan coba terus melanjutkan. Kita bisa efisien tanpa mengorbankan *safety* dan juga kinerja tetap baik. Itu yang ingin kami kontribusikan ke negara,” ungkapnya. ●

PENERIMAAN MIGAS 2018 MELEBIHI TARGET

Penerimaan Migas (Rp triliun)



Komposisi Penerimaan Migas 2018:



Penerimaan Migas mencapai **Rp. 228 Triliun** atau **182% dari target** APBN 2018 sebesar Rp. 125 Triliun

BBM SATU HARGA

YANG DULU MAHAL, KINI JADI MURAH

131
TITIK

Realisasi BBM Satu Harga hingga 2018



Rp Harga Jual BBM menjadi:

Rp. 5.150 SOLAR Rp. 6.450 PREMIUM

Harga sebelumnya:

Kab. Puncak, Papua Rp 100.000
Nunukan, Kaltara Rp 40.000
Peg. Arfak, Papua Barat Rp 30.000



Road Map BBM Satu Harga



2017 **57 titik**

2018 **73 titik**

2019 **30 titik**

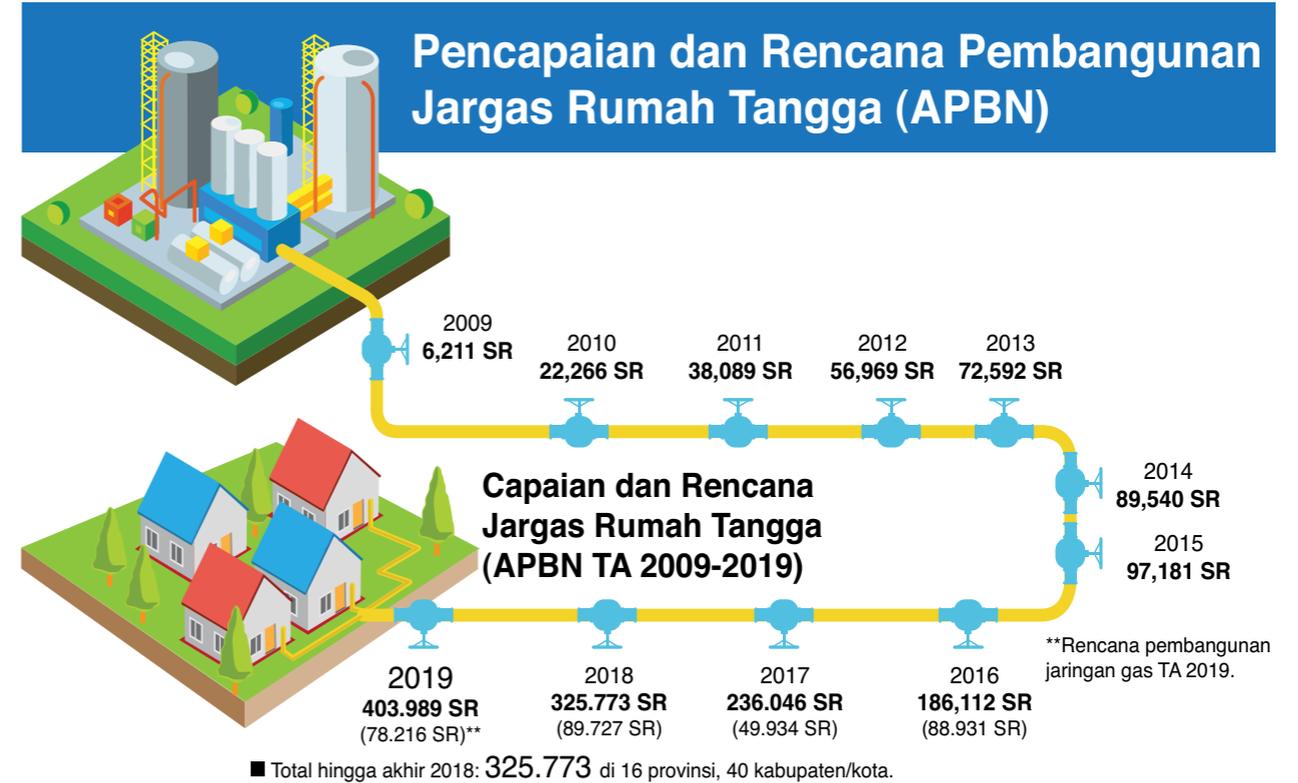
● Pertamina ● Swasta

● 54 titik ● 3 titik

● 67 titik ● 6 titik

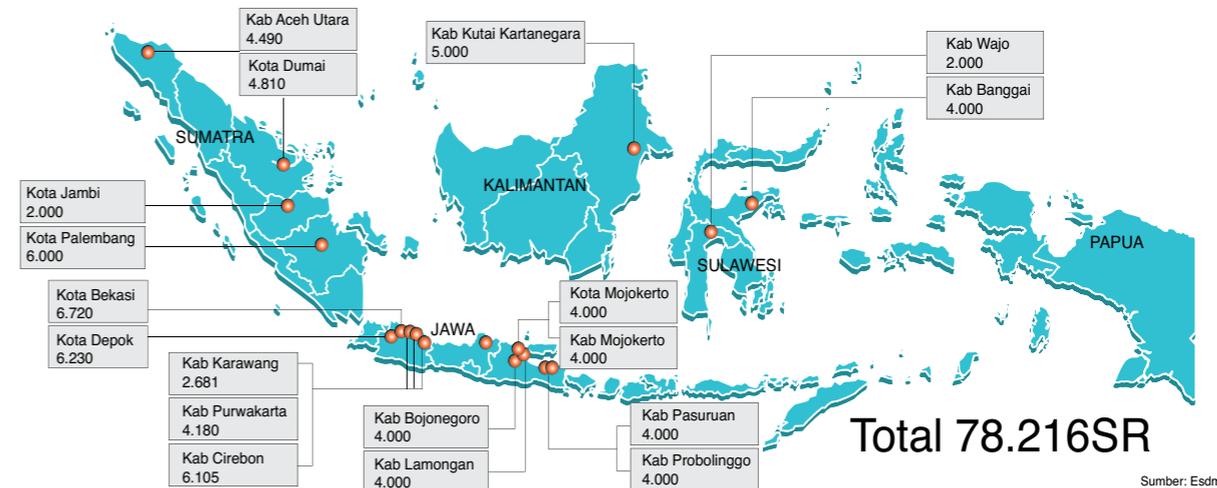
● 29 titik ● 1 titik

Pencapaian dan Rencana Pembangunan Jargas Rumah Tangga (APBN)



Rencana Pembangunan Jargas Rumah Tangga (APBN TA 2019)

Total rencana pembangunan 2019: 78.216SR (18 lokasi).



Sejak dibangun pertama kali tahun 2009, pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga (jargas) terus berlanjut hingga saat ini. Memasuki tahun 2019, pembangunan jargas terlihat di berbagai wilayah. Hingga kini, total Sambungan Rumah (SR) jargas yang terbangun dengan dana APBN tercatat 325.773 SR yang terdistribusi di 16 provinsi, 40 kabupaten/kota.

Pembangunan Jargas Terus Berlanjut

Pemerintah berkomitmen akan terus mendorong dan mempercepat program jargas. Setiap tahunnya, pemerintah mengeluarkan dana APBN untuk menambah jaringan gas rumah tangga di berbagai daerah. Harapannya, semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat besar penggunaan gas bumi.



Tarakan, 15 Februari 2019

Menteri ESDM Ignasius Jonan meresmikan pengoperasian 4.695 SR jargas di Kampung Enam, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Jumat (15/2). Ini merupakan kali ketiga, Kota Tarakan mendapatkan bantuan pembangunan jargas dari Pemerintah. Dengan peresmian ini, berarti sekitar 70% rumah tangga di kota ini telah teraliri gas bumi. Jargas yang diresmikan ini dibangun dengan dana APBN tahun 2018 oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN) berdasarkan penugasan Pemerintah, di enam lokasi, yaitu Kampung Enam sebanyak 1.328 SR, Kampung

Empat 1.295 SR, Mamburunga 1.101 SR, Mamburungan Timur 281 SR, Rusunawa dan Perum Khusus 283 SR serta Penetrasi 407 SR. Pasokan gas bumi untuk jargas Kota Tarakan berasal dari Medco Sinergi Indonesia dan Pertamina EP Bunyu. Jargas di Kota Tarakan dibangun dalam tiga tahap, yaitu tahun 2010 sebanyak 3.366 SR, tahun 2016 21.000 SR dan 2018 sebanyak 4.695 SR. Hingga saat ini, sebanyak 29.061 rumah tangga telah teraliri gas bumi atau sekitar 70% dari total rumah tangga di Kota Tarakan. Investasi pembangunan jargas dalam tiga tahap ini mencapai Rp 332 miliar.



Pasuruan, 8 Januari 2019

Menteri ESDM Ignasius Jonan meresmikan jargas di Kota Pasuruan, Jawa Timur, Selasa (8/1). Pada Tahun 2018, Pemerintah dengan dana APBN membangun 89.906 sambungan rumah (SR) dan untuk Kota Pasuruan telah dibangun 6.314 SR melalui penugasan kepada PT PGN.

Serang, 11 Januari 2019

Bertempat di Kantor Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Jumat (11/1), Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syarial didampingi Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, meresmikan pengoperasian jargas yang dibangun Pemerintah melalui dana APBN tahun 2018. Jargas Serang dibangun di Kelurahan Serdang, Wanayasa, Toyomerto, Pejaten dan Kramatwatu sebanyak 5.043 SR. Pasokan gas sebesar 0,2 MMSCFD berasal dari ConocoPhillips Grissik Ltd. Infrastruktur ini dibangun dan dikelola oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN) berdasarkan penugasan Pemerintah.



Bontang, 16 Februari 2019

Hanya berselang sehari dari peresmian kali ketiga jargas di Tarakan, Menteri ESDM Ignasius Jonan meresmikan 5.005 SR jargas di Kota Bontang, Kalimantan Timur, Sabtu (16/2). Jargas Kota Bontang mendapatkan suplai gas dari PT Pertamina Hulu Mahakam dengan alokasi sebanyak 0,2 MMSCFD. Kementerian ESDM menugaskan Pertamina melalui anak usahanya yakni Pertamina Gas dan Pertagas Niaga untuk membangun dan mengelola jargas Kota Bontang. Selanjutnya jargas yang telah selesai dibangun di Kecamatan Bontang Utara, Bontang Selatan dan Bontang Barat akan segera dioperasikan secara bertahap. Ini merupakan kali ketiga Kota Bontang mendapatkan manfaat program jaringan gas kota. Pengembangan jargas sudah dilakukan secara bertahap di Kota Bontang mulai di tahun 2011 (3.960 SR), tahun 2017 (8.000 SR) dan terakhir di tahun 2018 (5.005 SR). Sehingga kini total jaringan gas rumah tangga di Kota Bontang adalah 16.965 SR. Pembangunan 5.005 SR jaringan gas di Kota Bontang meliputi Kelurahan Kampung Enam (1.336 SR), Kelurahan Kampung Empat (1.274 SR), Kelurahan Mamburungan (1.030 SR), Kelurahan Karang Rejo (164 SR), Kelurahan Pamusian (283 SR) untuk rusunawa dan perum khusus serta penetrasi sebanyak (349 SR).





Bogor, 27 Februari 2019

Menteri ESDM Ignasius Jonan kembali meresmikan 5.120 SR jargas di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/2), yang bertempat di Masjid Hakimah Wa Rohmah, Perum Puri Nirwana 3, Cibinong, Kabupaten Bogor. Pembangunan 5.120 SR jargas di Kabupaten Bogor berada di wilayah Kecamatan Cibinong dan Bojong Gede. Program Jargas di Kabupaten Bogor ini merupakan kelanjutan dari pembangunan jargas di Kabupaten Bogor pada tahun 2012 sebanyak 4.000 SR dan tahun 2018 sebanyak 5.120 SR. Secara keseluruhan, SR yang telah dibangun di Kabupaten Bogor sampai tahun 2018 ini adalah sebanyak 9.120 SR. Pembangunan infrastruktur jargas di Kabupaten Bogor ditugaskan kepada PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk. Untuk pasokan gasnya berasal dari PT Pertamina EP Asset II melalui Jaringan Pipa Existing Pgasol dengan alokasi sebesar 0,2 MMSCFD.

Sidoarjo, 1 Maret 2019

Menteri ESDM meresmikan pengoperasian 7.093 SR jargas di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (1/3). Dalam kesempatan sama, diserahkan pula secara simbolis 196 paket konversi BBM ke LPG untuk nelayan kecil di Sidoarjo. Jargas Sidoarjo dibangun dengan menggunakan dana APBN tahun 2018, pasokan gas berasal dari Lapindo Brantas Ltd sebesar 0,4 MMSCFD. Jargas dibangun di tujuh desa, yaitu Desa Banjar Panji, Banjar Asri, Penatarsewu, Sentul, Kalisampurno, Kedensari, dan Boro. Ini merupakan kali kelima jargas dibangun di Kabupaten Sidoarjo. Jargas pertama kali dibangun di Sidoarjo tahun 2010 sebanyak 4.061 SR. Selanjutnya 2.457 tahun 2011, tahun 2012 sebanyak 2.230 SR, tahun 2014 sebanyak 1.702 dan terakhir 2018 mencapai 7.093 SR. Total jargas yang dibangun di Kabupaten Sidoarjo sebesar 17.543 SR.



Deli Serdang, 6 Maret 2019

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar meresmikan pengoperasian jargas di Deli Serdang, Rabu (6/3). Fasilitas yang dibangun dengan dana APBN tahun 2018 ini adalah sebanyak 5.560 SR. Setelah dibangun Pemerintah dengan menggunakan dana APBN, jargas Deli Serdang selanjutnya dikelola oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk. Pasokan gas berasal dari PT Pertamina EP dengan volume 0,2 MMSCFD. Jargas Deli Serdang dengan total panjang pipa mencapai 120.738 meter, dibangun di Kelurahan Tanjung Morawa A, Tanjung Morawa B, Dahang Kelambir, Tanjung Baru, Pekan Tanjung Morawa, Dalu XA, Dagang Kerawan dan Wonosari. Total investasi jargas ini mencapai Rp 71,44 miliar.



Musi, 15 Maret 2019

Pemerintah terus meningkatkan pemanfaatan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga (jargas) di wilayah Sumatera. Salah satu di antaranya adalah di Kabupaten Mushi Rawas yang mendapat 5.182 SR. Jargas dibangun oleh Pemerintah dengan dana APBN tahun 2018. Peresmian pengoperasian jargas Mushi Rawas dipusatkan di Desa Rantau Alih, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Mushi Rawas, Jumat (15/3), oleh Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Alimuddin Baso, Anggota Komisi VII DPR Nazarudin Kiemas, didampingi Bupati Mushi Hendra Gunawan, serta Direktur Utama PT Pertagas Niaga Linda Sunarti. Pengoperasian jargas di Mushi Rawas memanfaatkan memanfaatkan sumber gas yang berasal dari sumur PT Pertamina EP Asset 2 Pendopo Field, dengan volume 0,2 MMSCFD. Seluruh sambungan rumah tangga ini akan diaktifkan secara bertahap melalui proses konversi kompor gas yang dilakukan oleh operator dari PT Pertagas Niaga.

Lhokseumawe, 15 Maret 2019

Pengoperasian jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga (jargas) kembali diresmikan Pemerintah c.q Kementerian ESDM, Jumat (15/3). Kali ini, sebanyak 2.000 SR diresmikan di Kota Lhokseumawe, Aceh. Ini merupakan kali kedua setelah tahun 2014, Kota Lhokseumawe mendapat sambungan jargas sebanyak 3.997 SR. Peresmian pengoperasian jargas di Kota Lhokseumawe dilakukan oleh Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Mustafid Gunawan di Gampong (desa) Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe.

Cirebon, 21 Maret 2019

Bertempat di Kantor Kelurahan Kalijaga, Harjamukti, Kota Cirebon, Kamis (21/3), Menteri ESDM Ignasius Jonan didampingi Dirjen Migas Djoko Siswanto, Walikota Cirebon Nashrudn Azis serta Dirut PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk Gigih Prakoso, meresmikan beroperasinya jargas di Kota Cirebon, Jawa Barat. Sebanyak 3.503 SR telah rampung dibangun Pemerintah dengan dana APBN tahun 2018. Ini merupakan kedua kalinya masyarakat Kota Cirebon mendapat fasilitas jargas secara gratis. Pembangunan jargas di Cirebon pertama kali berlangsung pada tahun 2012 sebanyak 4.000 SR. Dengan demikian, total terpasang jargas Kota Cirebon sebanyak 7.503 SR. Setelah rampung dibangun, jargas Kota Cirebon dikelola oleh PGN. Gas dipasok dari PT Pertamina EP sebesar 0,2 MMSCFD.





Samarinda, 25 Maret 2019

Bertempat di Sektor 1 Pelita 7, Kota Samarinda, Dirjen Migas Djoko Siswanto meresmikan pengoperasian jargas Kota Samarinda, Senin (25/3). Total jargas yang dibangun Pemerintah dengan dana APBN tahun 2018 di kota ini adalah sebanyak 4.500 SR yang tersebar di berbagai lokasi di Kecamatan Sambutan. Sejak pengaliran gas dilakukan bulan Desember 2018, saat ini sebanyak 401 SR telah mengalirkan gas ke dapur warga. Alokasi gas dimanfaatkan sebanyak 0,25 MMSCFD dari PT Pertamina EP Asset 5 Sangatta. PT Pertamina, melalui PT Pertamina Gas dan PT Pertagas Niaga, ditugaskan Pemerintah untuk membangun, mengelola serta mengembangkan jargas di kota ini.

Balikpapan, 27 Maret 2019

Bertempat di Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kota Balikpapan, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto, Rabu (27/3), meresmikan pengoperasian jargas bagi 5.000 SR di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. PT Pertagas Niaga berperan sebagai operator jargas di wilayah ini sejak bulan Maret 2019. Ini merupakan kedua kalinya Kota Balikpapan mendapat program jargas. Sebelumnya pada tahun 2016, sebanyak 3.849 SR telah terpasang di rumah warga.



Penajam Paser Utara, 27 Maret 2019

Selain Kota Balikpapan, Rabu (27/3), warga Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, juga secara resmi telah merasakan manfaat jargas. Peresmian pengoperasian jargas dilakukan di Kelurahan Nenang oleh Anggota Komite BPH Migas Jugi Prajogio. Jargas di Kabupaten PPU merupakan yang pertama kali dibangun oleh Ditjen Migas, Kementerian ESDM dan tersebar di Kelurahan Nenang, Penajam, Nipah-Nipah, Gunung Seteleng, dan Sungai Parit.



Palembang, 31 Maret 2019

Menteri ESDM Ignasius Jonan meresmikan mulai beroperasinya 4.315 SR jargas di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (31/3). Total jargas yang terbangun di Kota Palembang sebanyak 7.626 SR. Pemerintah menugaskan PT Pertamina (Persero) untuk melaksanakan pembangunan, pengoperasian serta pengembangan jargas Palembang melalui afiliasinya PT Pertamina Gas dan PT Pertagas Niaga. Jargas Kota Palembang tahun 2018 dibangun di Kelurahan Tuan Kentang, Lima Ulu, Enam Belas Ulu dan Plaju Ulu. Suplai gas dari KKKS Medco E&P- Future Connection Pertagas SSA, Pertamina (Persero) sebesar 0,2 MMSCFD.

Gedung Migas, Jakarta, 26 April 2019

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Kontraktor Pelaksana menandatangani kontrak pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga (jargas) di enam wilayah, Jumat (26/4), di Gedung Migas, Jakarta. Turut menyaksikan Sesditjen Migas Iwan Prasetya Adhi mewakili Dirjen Migas serta Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Alimuddin Baso. Keenam wilayah yang dimaksud adalah Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Banggai. Total nilai kontrak pembangunan jargas ini Rp. 244.633.016.903,40. Untuk memastikan pembangunan lancar, tim Ditjen Migas juga akan melakukan supervisi di lapangan, sekaligus bersama kontraktor akan berkonsolidasi dengan pemerintah daerah.

Kementerian ESDM, Jakarta, 7 April 2019



Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Djoko Siswanto menerima kunjungan Bupati Ogan Komering Ulu Kuryana Azis di Kementerian ESDM, Selasa (7/5). Dalam pertemuan tersebut, Bupati Kuryana Azis menyampaikan harapan masyarakatnya agar daerah Ogan Komering Ulu juga mendapat fasilitas jargas. Terhadap permintaan tersebut, Djoko menyampaikan, Pemerintah telah rampung melakukan FEED pembangunan jargas untuk Ogan Komering Ulu dan direncanakan akan dibangun pada tahun 2020 mendatang. Pada tahap awal, akan dibangun sebanyak 4.000 SR. Untuk mendukung kelancaran pembangunan jargas, Dirjen Migas meminta agar Pemkab Ogan Komering Ulu membantu kemudahan perizinan, pengawalan serta pengawasan.



Capaian Subsektor Migas Tahun 2018

Subsektor minyak dan gas bumi (migas) mencatat torehan positif sepanjang tahun 2018. Apa sajakah capaian subsektor migas selama tahun 2018? Berikut uraiannya sesuai konferensi pers capaian kinerja Kementerian ESDM tahun 2018 di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (4/1).

1. Realisasi PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sektor ESDM pada tahun 2018 mencapai Rp 217,5 triliun, atau 181% dari target APBN 2018 (Rp 120,5 triliun). Dari total tersebut, PNBP dari subsektor migas tercatat mencapai Rp 163,4 triliun.
2. Investasi sektor ESDM mencapai US\$ 32,2 miliar, di mana investasi migas mencapai US\$ 12,5 miliar.
3. Sebanyak 56 regulasi/perizinan subsektor migas dicabut, dengan perincian: 18 regulasi dan 23 perizinan di Kementerian ESDM, 12 regulasi di SKK Migas dan 3 regulasi di BPH Migas.
4. Sebanyak 54% anggaran ESDM tahun 2018 diperuntukkan untuk belanja infrastruktur rakyat, yang meliputi pembangunan jaringan gas kota, konverter kit LPG untuk nelayan, lampu tenaga surya hemat energi, hingga sumur bor untuk daerah sulit air.
5. Subsidi energi makin tepat sasaran, dialihkan untuk belanja yang lebih produktif. Tahun 2018, subsidi BBM/LPG sebesar Rp 97 triliun.
6. Realisasi Program BBM Satu Harga hingga akhir 2018 tercatat di 131 titik.
7. Realisasi Program Konverter Kit BBM ke LPG untuk nelayan kecil mencapai 25.000 unit di 53 kabupaten/kota.
8. Pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga pada tahun 2018 sebanyak

89.906 sambungan rumah (SR). Total SR jargas yang terbangun hingga saat ini sebanyak 463.619 SR.

9. Lifting migas 2018 sebesar 1.917 MBOEPD, atau 96% dari target APBN sebesar 2.000 MBOEPD.
10. Setelah 50 tahun lebih dikelola oleh Total E&P, terhitung 1 Januari 2018 Blok Mahakam dikelola oleh nasional melalui Pertamina.
11. Pemerintah menetapkan Blok Rokan akan dikelola Pertamina mulai 9 Agustus 2021. Dengan demikian, pada tahun 2021, Pertamina akan menyumbang 60% dari produksi minyak nasional.
12. Hingga 2018, sebanyak 36 wilayah kerja (WK) migas telah menggunakan skema gross split, yaitu 14 blok hasil lelang 2017 dan 2018, 21 blok terminasi dan 1 blok amandemen.
13. Dengan menggunakan gross split, diperoleh bonus tanda tangan US\$ 895,4 juta atau sekitar Rp 13,4 triliun serta komitmen pasti eksplorasi US\$ 2,1 miliar atau Rp 31,5 triliun.
14. Upaya Pemerintah mendorong efisiensi biaya operasi pada tahun 2017 mulai terlihat, sehingga penerimaan Pemerintah lebih tinggi dibandingkan cost recovery. Hingga November 2018, penerimaan negara mencapai US\$ 17,5 miliar. Sedangkan cost recovery US\$ 11,7 miliar.
15. Total penerimaan migas tahun 2018 mencapai Rp 228 triliun, terdiri dari PNBP Migas Rp 163,4 triliun dan PPh migas Rp 64,7 triliun. ●



Sharing Session Bersama Wamen Arcandra

Menarik investor minyak dan gas bumi (migas) ke Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya melalui peraturan. Aturan yang dianggap sudah tak relevan lagi dengan perkembangan industri migas saat ini bukan tak mungkin perlu direvisi, seperti pada Peraturan Menteri ESDM No. 27 Tahun 2006.

Para pegawai di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi kedatangan tamu istimewa saat sharing session di Gedung Ibnu Sutowo, Rabu (15/5). Tamu yang dimaksud adalah Wakil Menteri (Wamen) Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar. Dalam kesempatan tersebut, Arcandra mengisi *sharing session* dengan pembahasan kontrak bagi hasil *gross split*.

Mengawali *sharing session*, Wamen Arcandra menyampaikan prinsip-prinsip dasar kontrak *cost recovery*. Banyak distorsi pada sistem ini, terutama dari segi biaya operasional

serta proses yang memakan waktu. Ia mengibaratkan *cost recovery* dengan negara sebagai pemilik lahan yang bekerja sama dengan petani atau kontraktor. Seluruh biayanya ditanggung oleh pemilik lahan, sementara keuntungannya akan dibagi dua antara pemilik lahan dengan petani. Masalahnya, pemilik lahan seringkali tidak menguasai cara bercocok tanam sehingga berpotensi terjadi perdebatan dalam penetapan *cost recovery*.

Kemudian, ia beralih dengan pembahasan *gross split* yang selain mendorong efisiensi di banyak



hal, juga memaksa kontraktor bisa memilih teknologi yang tepat sesuai dengan kondisi blok migas yang dikelolanya.

Sistem *gross split* sendiri memiliki tiga prinsip utama, yaitu *certainty*, *simplicity*, dan *efficiency*. Prinsip *certainty* memberikan parameter insentif jelas dan terukur sesuai dengan karakter atau tingkat kesulitan pengembangan lapangan minyak dan gas bumi.

Sementara prinsip *simplicity*, mendorong bisnis proses kontraktor dan SKK Migas menjadi lebih sederhana dan akuntabel sehingga sistem pengadaan (*procurement*) yang birokratis dan perdebatan yang terjadi selama ini menjadi berkurang,

Adapun prinsip *efficiency*, mendorong para kontraktor migas dan industri penunjang migas untuk lebih efisien sehingga lebih mampu menghadapi gejolak harga minyak dari waktu ke waktu. ●



Menteri Jonan Lantik Rizwi Hisjam Sebagai Direktur Hilir Migas

Menteri ESDM Ignasius Jonan melantik dan mengambil sumpah 37 pejabat di lingkungan Kementerian ESDM, Senin (14/1). Dari jumlah tersebut, terdapat Pejabat Eselon II yang dilantik, yakni Muhammad Rizwi Jinalisaf Hisjam sebagai Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas. Jabatan baru ini merupakan promosi bagi Rizwi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Rencana dan Laporan pada Sekretariat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Secara keseluruhan, ke-37 pejabat yang dilantik tersebut terdiri dari 1 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), 19 Pejabat Administrator (Eselon III) serta 17 Pejabat Pengawas (Eselon IV). Khusus Ditjen Migas, pejabat lainnya yang dilantik adalah:

- Heru Windiarjo sebagai Kepala Subdirektorat Penerimaan Negara dan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Minyak dan Gas Bumi pada Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi.
- Mochamad Ilham Syah sebagai Kepala Seksi Niaga Minyak Bumi pada Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.



- Christina Meiwati Sinaga sebagai Kepala Seksi Pengangkutan Minyak Bumi pada Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
- Enni Elvi Damanik sebagai Kepala Seksi Harga Bahan Bakar pada Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Dalam pelantikan tersebut, Menteri Jonan meminta para pejabat saat menjalankan tugasnya haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bersikap

pro aktif supaya menghasilkan kerja yang lebih baik.

Untuk Direktur Pembinaan Hilir Migas, Menteri Jonan meminta agar terus mendorong pembangunan kilang minyak baru di Indonesia. Selain itu, dipimpin Wamen ESDM, membuat suatu formula agar harga BBM di Indonesia menjadi wajar. Terakhir, membuat harga avtur harus kompetitif dibandingkan negara lainnya, seperti Singapura. ●



Dirjen Migas Hadiri Rapat Dengar Pendapat dengan DPR



Dirjen Migas Djoko Siswanto menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR, Rabu (16/1). Dalam rapat tersebut, terungkap bahwa Ditjen Migas mendapat alokasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp 1.171,37 miliar.

Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 980,34 miliar atau 83,69% digunakan untuk belanja publik fisik yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Alokasi lainnya sebesar Rp 145,41 miliar atau 12,41% untuk belanja aparatur dan belanja publik non fisik Rp 45,62 miliar atau 3,88%.

Anggaran Ditjen Migas tahun 2019 sebesar Rp 1.171,37 miliar ini lebih kecil jika dibandingkan tahun 2018. Penurunan ini sejalan dengan turunnya anggaran Kementerian ESDM yang tahun ini ditetapkan Rp 4,99 triliun dari sebelumnya Rp 6,5 triliun pada tahun 2018.

Dalam kesempatan yang sama, Djoko Siswanto juga menyampaikan usulan

revisi pembangunan infrastruktur tahun 2019, yaitu pembangunan jaringan gas bumi (jargas) untuk rumah tangga sebanyak 74.216 sambungan rumah (SR) dengan pagu Rp 799,96 miliar. Sebelumnya, rencananya jargas akan dilakukan sebanyak 78.216 SR dengan pagu Rp 852,48 miliar.

Selain itu, Program Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan di 36 lokasi sebanyak 13.305 paket dengan dana Rp 111,27 miliar. Program lainnya adalah Konversi BBM ke Bahan Bakar

Gas untuk Petani sebanyak 1.000 paket di lima lokasi, yaitu Sragen, Boyolali, Klaten, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Malang. Alokasi anggarannya sebesar Rp 8,12 miliar.

Selanjutnya, review FEED-DEDC pembangunan jargas di 15 lokasi sebesar Rp 1,58 miliar. Terakhir, kegiatan luncuran PMK 243 di 10 lokasi dengan anggaran Rp 52,52 miliar di Lhokseumawe, Palembang, Prabumulih, Musi Rawas, Serang, Bogor, Cirebon, PALI, dan Samarinda. ●





Pelantikan 26 Pejabat Struktural Kementerian ESDM

Menteri ESDM Ignasius Jonan melantik dan mengambil sumpah 26 pejabat di lingkungan Kementerian ESDM, bertempat di Ruang Sarulla, Rabu (6/2) petang. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Jonan meminta agar para pejabat dapat bekerja dengan

lebih baik, berkarya, dan mengabdikan untuk bangsa dan negara.

Para pejabat yang dilantik pada kesempatan ini, ada yang mendapat promosi dan sebagian juga merupakan mutasi. Untuk pejabat

yang mendapat promosi, menurut Jonan, terdapat dua mekanisme yaitu melalui assessment dan pengabdian. Untuk pejabat yang mendapat promosi melalui pengabdian adalah pegawai yang sudah berkarya untuk waktu yang panjang, tanpa ada catatan negatif.

Salah satu pejabat yang dilantik dalam kesempatan ini adalah Muhammad Sapta Murti sebagai Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Perundang-undangan dan Tata Kelola. Sementara 25 pejabat lain yang dilantik, terdiri dari 9 pejabat eselon III dan 16 pejabat eselon IV.

Khusus untuk Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, pejabat yang dilantik adalah:

- Diyan Wahyudi sebagai Kepala Bagian Rencana dan Laporan
- Muhiddin sebagai Kepala Subdirektorat Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi
- Raden Yuniarto Revolida sebagai Kepala Seksi Keselamatan Instalasi Hilir Minyak dan Gas Bumi



Pemerintah Bentuk Satgas Atasi *Illegal Drilling*



Pemerintah membentuk Tim Satgas Penanganan Kegiatan Ilegal Migas yang salah satu tujuannya untuk mengatasi illegal drilling. Hal ini terungkap saat Dirjen Migas Djoko Siswanto menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR, Senin (4/2).

“Berawal dari rapat pembahasan kegiatan ilegal migas bersama Kemenkopolkum pada tanggal

9 Februari 2017, Kementerian ESDM telah melakukan koordinasi bersama Kemenkopolkum terkait pembentukan Tim Satgas Penanganan Kegiatan Ilegal Migas,” papar Djoko Siswanto.

Tim Satgas ini nantinya diharapkan dapat secara khusus menangani praktek kegiatan ilegal migas, termasuk kegiatan ilegal hulu dan hilir migas.

“Pembentukan Satgas Penanggulangan Ilegal Migas dengan anggota lintas kementerian atau lembaga, merupakan salah satu alternatif solusi yang kami harapkan mampu menanggulangi ilegal migas secara masif dan sistematis,” kata Djoko.

Illegal drilling merupakan salah satu permasalahan dalam subsektor migas yang saat ini masih menjadi tantangan bagi Pemerintah. Lebih lanjut Djoko memaparkan, kegiatan *illegal drilling* merupakan pelanggaran atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Kegiatan *illegal drilling*, antara lain terjadi di Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Langkat, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, serta di WK PT Pertamina EP Asset 4 yang terletak di wilayah Kabupaten Blora, Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban.

Sebanyak 126 *illegal drilling* di Sumatera Selatan telah berhasil ditutup di tahun 2017 dan illegal tapping di Prabumulih telah berhasil ditangkap pada bulan April 2018. *Illegal drilling* di Kabupaten Blora dan Bojonegoro telah diarahkan ke pengusaha sumur tua melalui BUMD bekerja sama dengan PT Pertamina EP sesuai Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2008. Selain itu, sebanyak 110 sumur *illegal drilling* di WK Techwin Benakat South Betung Ltd telah berhasil ditutup. ●



Pembukaan IndoGAS 2019

Menteri ESDM Ignasius Jonan membuka resmi Konferensi dan Pameran International Gas Indonesia (IndoGAS) 2019 di Jakarta Convention Centre, Selasa (19/2). Hadir dalam pembukaan tersebut antara lain Dirjen Migas Djoko Siswanto, Dirjen Kelistrikan Andy Sommeng, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto, Kepala BPSDM IGN Wiratmaja Puja serta *Chairman Indonesian Gas Society (IGS) & Organizing Committee IndoGAS 2019* Didik Sasongko Widi.

Menteri ESDM dalam kesempatan tersebut mengapresiasi penyelenggaraan forum dua tahunan IndoGAS ini, sebagai forum bertemunya para pelaku industri dengan para pemangku kebijakan, mencari solusi terbaik demi perkembangan industri gas alam di Indonesia, terutama terkait regulasi, investasi dan pembangunan infrastruktur untuk pengembangan energi Indonesia ke depan.

Konferensi dan Pameran International Gas Indonesia (IndoGAS) 2019

dilaksanakan pada 19-20 Februari 2019 di Jakarta, dengan tema “*Gas for Today and for A Sustainable Energy Future*”. INDOGAS 2019 diselenggarakan oleh *Indonesian Gas Society (IGS)* dan IEEC serta dihadiri oleh lebih dari 200 pelaku industri gas dari dalam dan luar negeri.

IndoGAS sebagai forum lintas fungsi Internasional turut menghadirkan Joo

Myung Kang, President International Gas Union (IGU) untuk berbagi informasi kepada praktisi industri gas Indonesia dalam tema Global LNG outlook. IGU sebagai organisasi non-profit terkemuka di dunia untuk bidang gas, mendorong IGS untuk terus aktif mendorong gas untuk pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. ●



Dirjen Migas Berikan Pengarahan Kepada CPNS Ditjen Migas



Dirjen Migas Djoko Siswanto memberikan pengarahan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Ditjen Migas yang lolos seleksi penerimaan CPNS Kementerian ESDM tahun 2018, Kamis (21/02). Hadir mendampingi Dirjen Migas, para pejabat eselon II di lingkungan Ditjen Migas.

Mengawali arahnya, Dirjen Migas menceritakan pengalaman awal dirinya menjadi PNS di Ditjen Migas. Ia pun menyampaikan harapannya agar para CPNS dapat menjadi bibit-bibit baru yang terus mengembangkan diri, baik dari sisi pengetahuan, kinerja serta integritas.

“Kerja saja yang bagus yang baik. Waktu saya tahun ‘92 masuk sini

menjadi PNS saya diminta membuat konsep surat, konsep surat bolak-balik sampai enam kali, yang ke-6 balik ke konsep surat yang pertama. Tidak perlu kesal, dinikmati saja. Kita di PNS punya waktu lebih banyak untuk belajar semua dari hulu sampe hilir migas. Harapan saya kalian dapat memperluas dan memperdalam pengetahuan kalian soal migas.” tutur Djoko.

Lebih lanjut dia memaparkan, saat ini Pemerintah, di sektor migas, sedang fokus mengubah skema kontrak kerja sama hulu migas lama *Cost recovery* menjadi *Gross split* serta membangun infrastruktur yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Selain memberikan paparan soal skema *Gross split*, Menteri ESDM juga berkesempatan melakukan dialog dengan CPNS terkait infrastruktur yang sedang menjadi program prioritas Ditjen Migas seperti Jargas untuk rumah tangga dan konverter kit untuk nelayan kecil. ●



Rakor Evaluasi Program Kegiatan 2019

Ditjen Migas menyelenggarakan Rapat Koordinasi Evaluasi Program Kegiatan 2019 serta Penandatanganan Perjanjian Kerja 2019 di Hotel Padjajaran, Jumat (22/2). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas dan soliditas kinerja.

Dalam kesempatan itu, Dirjen Migas Djoko Siswanto meminta agar seluruh jajaran pimpinan eselon II untuk meningkatkan kinerja dan inovasi di tahun 2019.

“Perjanjian Kerja yang ditandatangani merupakan acuan kinerja selama satu tahun ke depan. Jangan terbatas hanya dengan target kinerja yang kita janjikan ini. Tetapi buatlah pemikiran dan ide yang kreatif hingga menjadi suatu inovasi demi memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat untuk menuju pelayanan yang prima dan *good governance*,” ujar Djoko Siswanto.

Rakor ini juga diisi dengan penandatanganan Perjanjian Kerja oleh para pejabat Eselon II di lingkungan Ditjen Migas. Dengan penandatanganan Perjanjian Kerja ini, lanjut Djoko, semua pihak berkomitmen untuk mewujudkan target.

“Kita harus bertanggung jawab terhadap keberhasilan maupun kegagalan dari capaian kinerja kita,” tambahnya.

Untuk kelancaran dan kesuksesan program kerja subsektor migas tahun 2019, Dirjen Migas mengimbau agar dilakukan pemantauan target dan capaian secara periodik, persiapan pelaksanaan yang lebih baik untuk menghindari penumpukan pencairan



di akhir tahun, serta menjaga *governance* dan akuntabilitas.

Untuk tahun anggaran 2019, Ditjen Migas mendapatkan pagu sebesar Rp 1,171 triliun, di mana sebesar 83% dari anggaran tersebut dialokasikan untuk aktivitas yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat, seperti pembangunan jargas dan pembagian konverter kit nelayan. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mencapai sejumlah kegiatan prioritas nasional serta sasaran strategis dan target yang ditetapkan di dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen Migas.

Kegiatan Prioritas Nasional tersebut antara lain:

1. Penawaran WK Migas Konvensional dan Non Konvensional
2. Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga
3. Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Petani dan Nelayan
4. Rivi Dokumen FEED-DEDC dan UKL UPL Jargas untuk Rumah Tangga
5. Layanan Perencanaan dan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Grass Root dan RDMP

Sedangkan IKU Ditjen Migas adalah:

1. *Lifting* Minyak dan Gas Bumi, 2.050 MBOEPD.

2. Penandatanganan WK Migas Konvensional dan Non Konvensional sebanyak 8 WK.
3. Cadangan Migas sebesar 5,747 MMSTB untuk minyak bumi dan 142 TCF untuk gas bumi.
4. Persentase alokasi gas domestik sebesar 64%
5. Volume BBM dan LPG bersubsidi masing-masing sebesar 15,11 juta KL dan 6,978 juta KL
6. Fasilitas pembangunan FSRU sebanyak 1 unit
7. Pembangunan jaringan gas kota sebanyak 78.216 SR.
8. Penerimaan negara sebesar Rp 234,73 triliun
9. Investasi migas sebesar US\$ 13,42 miliar.
10. Jumlah perusahaan yang kegiatan operasinya tidak terjadi kecelakaan, masing-masing 110 perusahaan hulu dan 225 perusahaan hilir. ●



Aplikasi e-Lelang WK Migas Raih Penghargaan Teknologi Informasi dan Inovasi Terbaik



Tiga aplikasi Kementerian ESDM meraih Penghargaan *Top IT & Innovation: Leadership on Energy & Mineral Resources Sector Transformation 2019* pada Itech Awards di Jakarta, Rabu (27/3). Ketiga aplikasi tersebut adalah Aplikasi *Mineral Online Monitoring System (MOMS)*, e-PNBP Mineral dan Batubara, dan e-Lelang Wilayah Kerja (WK) Migas.

Seperti yang telah diketahui, e-Lelang WK Migas adalah aplikasi berbasis web yang disediakan bagi perusahaan migas untuk melakukan registrasi dan akses *bid document*

dalam proses penawaran WK migas. Aplikasi yang telah diluncurkan sejak tahun 2015 ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

dalam proses lelang dalam upaya meningkatkan iklim investasi migas di Indonesia. ●



Pipa Gas Grissik-PUSRI Resmi Beroperasi

Menteri ESDM Ignasius Jonan meresmikan beroperasinya pipa transmisi *gas open access* Grissik-PUSRI (GrisPus) di Lapangan Patra Jaya, Kota Palembang, Minggu (31/3). Pekerjaan pembangunan pipa tersebut rampung pada akhir 2018, setelah masa konstruksi selama satu tahun lebih, sejak *ground breaking* Agustus 2017.

Pipa transmisi gas Grissik-PUSRI dibangun Pertagas dengan panjang 176 km dan diameter 20 inci, membentang melewati Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin dan Kota Palembang. Pipa transmisi gas Grissik-PUSRI diperlukan dalam menjaga pasokan gas yang berkelanjutan untuk industri pupuk, khususnya PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI) yang kini memiliki pabrik baru yaitu PUSRI II-B. Selain itu, pasokan gas tersebut ke depan juga akan memenuhi kebutuhan pembangkit listrik, pengembangan KEK Tanjung Api-Api, jaringan gas rumah tangga dan industri lainnya.

Menteri Jonan dalam kesempatan tersebut juga meminta agar

penetapan tarif pipa gas dilakukan secara fair. Semua pihak harus membuat paradigma baru agar industri migas menjadi efisien dan kompetitif.

“Kita coba kompetitif dalam bidang ini, supaya investasi lebih kompetitif,” tuturnya. ●



Satu-satunya di Timur Indonesia, PLTMG Ternate Resmi Beroperasi

Dirjen Migas Djoko Siswanto meresmikan beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) berkapasitas 30 MW di PLN Kastela, Kota Ternate, Maluku Utara, Selasa (9/4). PLTMG tersebut merupakan satu-satunya di wilayah Indonesia Timur hingga saat ini.

Dalam kesempatan itu, Djoko mengungkapkan, peresmian ini merupakan salah satu pergantian penggunaan solar dengan gas dalam bentuk PLTMG, dengan kapasitas 30 MW yang memiliki kemampuan dapat melistriki 160.000 rumah

tangga. Gas untuk PLTMG Kastela ini dipasok dari Bontang, Kalimantan Timur. Dengan menggunakan gas pada PLTMG Kastela ini, maka mampu menghemat pengeluaran Rp 150 miliar hingga Rp 200 miliar per tahun.

“Pemerintah juga bisa mengurangi impor solar karena bisa mengurangi subsidi BBM. Gas tidak disubsidi karena kita mempunyai sumber yang banyak di dalam negeri, seperti di Tanggu, Bintang, dan Sulawesi,” ujar Djoko.

Sebelumnya, Pemerintah juga telah meresmikan PLTMG di Sambera, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Gas untuk infrastruktur ini dipasok dari Bontang, Kalimantan Timur, yang berjarak 80 km dan diangkut dengan menggunakan truk. Setiap hari, sebanyak 24 truk bergantian mengisi PLTMG. ●



Dibuka, Lelang WK Migas Konvensional Tahap II 2019

Pemerintah membuka Lelang Wilayah Kerja (WK) Migas Konvensional Tahap II Tahun 2019 di Ruang Damar Kementerian ESDM, Rabu (8/5). Turut hadir dalam pengumuman pembukaan tersebut Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto. Dalam kesempatan tersebut, ia mengatakan, terdapat empat WK

yang ditawarkan melalui mekanisme lelang reguler tersebut. Seluruh WK Migas Konvensional tersebut ditawarkan menggunakan skema Kontrak PSC *Gross Split*. Keempat WK Migas Konvensional yang ditawarkan melalui mekanisme Lelang Reguler tersebut ialah WK Kutai (eksplorasi), WK Bone (eksplorasi), WK West Ganal (eksplorasi), dan WK West

Kampar (eks produksi). Lelang ini dibuka dari 8 Mei 2019 hingga 31 Juli 2019. Sedangkan batas akhir submit dokumen lelang pada 5 Agustus 2019 mendatang. Potensi *signature bonus* yang akan diterima Pemerintah dengan adanya penawaran WK Migas Konvensional tahap kedua tahun 2019 ini adalah sebesar USD 39 juta. ●



Sedotan Bambu untuk Peringati Peringati Hari Bumi



Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM membagikan sedotan bambu kepada para pegawai, tamu serta masyarakat sekitar lokasi Gedung Migas, Senin (22/4). Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Bumi yang secara internasional jatuh pada tanggal 22 April. Pembagian sedotan

ini mendapat sambutan positif dengan semangat mewujudkan bumi hijau, air serta udara yang bersih. Hari Bumi dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap bumi kita tercinta ini. Untuk menjaga planet bumi ini, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Cara paling mudah adalah membuang sampah

pada tempatnya, memilah sampah, menanam pohon, meminimalisir penggunaan plastik, menggunakan listrik seperlunya serta menggunakan kendaraan umum, sepeda atau berjalan kaki yang dapat mengurangi emisi kendaraan. ●

Penyaluran Beasiswa kepada Putra PNS Migas Korban Lion Air

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Muhamad Rizwi secara simbolis menyerahkan beasiswa dan asuransi pendidikan kepada putra Pegawai Negeri Sipil (PNS) Direktorat Jenderal Migas yang menjadi korban kecelakaan Lion Air JT 610 pada 29 Oktober 2018 lalu, bertempat di

Gedung Migas, Senin (29/4). Penerima beasiswa tersebut ialah Muhammad Emil Faiz Muwafah dan Muhammad Azka Awfa Musyafah yang merupakan putra almarhumah Inayah Fatwa Kurnia Dewi, serta Muhammad Sultan Hardiyanto yang merupakan putra almarhumah Dewi Herlina.

Sedangkan untuk almarhumah Jannatun Cintya Dewi, lantaran belum menikah, asuransi dan beasiswanya diserahkan kepada adik kandungnya. Bantuan tersebut merupakan kerja sama Ditjen Migas dengan badan usaha migas yaitu PT AKR Korporindo dan PT Pertamina Gas. ●



10 KKKS Pembayar Pajak Terbesar 2018

Sebanyak 10 kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) minyak dan gas bumi mendapatkan penghargaan dari Pemerintah sebagai penyeter pajak terbesar khusus migas tahun 2018 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Minyak dan Gas Bumi, Jakarta, Selasa (23/4).

Pertamina EP Cepu Grup dinobatkan sebagai KKKS penyeter dana terbesar yaitu sekitar Rp 8,08 triliun. Di tempat kedua adalah Pertamina EP Grup dengan besaran pajak yang disetor adalah Rp 7,4 triliun. Ketiga, ExxonMobil Grup dengan pajak Rp

4,5 triliun. Selanjutnya, Chevron Grup sebesar Rp 4,3 triliun dan ConocoPhillips Grup Rp 4,1 triliun.

Selengkapnya ke 10 KKKS tersebut sebagai berikut:

- Pertamina EP Cepu Grup
- Pertamina EP Grup
- Exxon Mobil Grup
- Chevron Grup
- ConocoPhillips Grup
- Pertamina Hulu Grup
- Pertamina Hulu Energi Grup
- BP Grup
- Talisman Grup
- Medco Grup



Sosialisasi Pedoman Teknis Keselamatan Peralatan dan Instalasi serta Pengoperasian Instalasi SPBU

Dalam rangka meningkatkan keselamatan dalam pengoperasian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Kementerian ESDM c.q. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan Sosialisasi Pedoman Teknis Keselamatan Peralatan dan Instalasi serta Pengoperasian Instalasi SPBU di Hotel Santika, Tangerang Selatan, Selasa (26/3). Acara dihadiri oleh Kepala Teknik PT Pertamina Patra Niaga, Shell Indonesia, AKR Corporindo, Vivo, Total beserta penyalur-penyalurnya.

Direktur Teknik dan Lingkungan Migas selaku Kepala Inspeksi, Adhi Wibowo, dalam sambutan mengatakan, sehubungan dengan makin banyaknya kejadian kecelakaan pada kegiatan operasi di SPBU, maka Pemerintah menerbitkan buku Pedoman Teknis Keselamatan Peralatan dan Instalasi serta

Pengoperasian Instalasi SPBU yang memberikan panduan mulai dari tahapan desain, operasi, pemeliharaan, tanggap darurat hingga persyaratan personil yang bekerja di SPBU.

Adhi mengungkapkan, sesuai Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 pasal 40, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap (BU/BUT) diwajibkan untuk menjamin keselamatan migas. Oleh karena itu, peran Kepala Teknik sangat penting mengingat Persetujuan Layak Operasi (PLO) tidak diwajibkan untuk kegiatan operasi di SPBU sesuai Peraturan Menteri ESDM No. 18 Tahun 2018.

Untuk meningkatkan keselamatan dalam kegiatan usaha migas termasuk SPBU ini,

Pemerintah juga telah menyediakan SMS Center Keselamatan Migas di 0812 9000 1717. Para penyalur BBM diharapkan untuk segera melapor ke nomor tersebut apabila terjadi kecelakaan migas, kondisi tidak aman ataupun pengaduan keselamatan migas lainnya. ●



Ditjen Migas Adakan Bazar Ramadhan

Dharma Wanita Persatuan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan Bazar Ramadhan. Kegiatan yang dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadhan serta menyongsong Hari Raya Idul Fitri 1440 H ini berlangsung selama dua hari, tanggal 20-21 Mei 2019, di Lobby Gedung Ibnu Sutowo. Pembukaan acara ditandai dengan pengguntingan pita oleh Sesditjen Migas Iwa Prasetya Adhi, Senin (21/5) dan dihadiri oleh Ketua Dharma Wanita Ditjen Migas Lucy

Djoko Siswanto, Ketua Koperasi Pegawai Ditjen Migas (KPDM) Bayu Wahyudiono, Ibu-ibu Dharma Wanita serta para pegawai. Ketua Dharma Wanita Ditjen Migas Lucy Djoko Siswanto dalam laporannya menyatakan, Bazar Ramadhan ini merupakan hasil kerja sama Dharma Wanita Ditjen Migas dengan KPDM yang bertujuan membantu para pegawai Ditjen Migas menyiapkan kebutuhan selama Ramadhan dan Idul Fitri 1440 H dengan harga terjangkau. ●



1.506 Pegawai Kementerian ESDM Ikut Mudik Gratis

Sebanyak 1.506 pegawai Kementerian ESDM ikut Mudik Bareng Kementerian ESDM. Pelepasan Mudik Bareng Kementerian ESDM ini berlangsung di halaman parkir Kementerian ESDM, Jumat (31/5). Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar melepas para pemudik yang terdiri dari pegawai golongan I, II, honorer dan pensiunan beserta keluarganya tersebut ke kampung halaman untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri 1440 H.

Pelepasan Mudik Bareng Kementerian ESDM ini dihadiri oleh para pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian ESDM, wakil BUMN sektor ESDM, yaitu PT Pertamina, PT PGN, PT Bukit Asam, PT PLN, PT Timah dan PT Antam serta Bank BRI.



Peserta mudik bareng KESDM terbagi dalam 2 lokasi yaitu di Jakarta sebanyak 30 bus dengan penumpang 1.362 orang serta di Bandung sebanyak 4 bus dengan jumlah penumpang 144 orang. Mereka akan menuju kampung halaman di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Kegiatan mudik bareng pegawai Kementerian ESDM ini merupakan agenda tahunan yang terlaksana atas kerja sama antara Kementerian ESDM dengan BUMN sektor ESDM serta BRI. Mudik bareng bertujuan untuk membantu para pegawai golongan I, II, honorer dan pensiunan Kementerian ESDM beserta keluarganya yang akan merayakan Idul Fitri di kampung halamannya dengan menyediakan transportasi yang aman dan nyaman. Kegiatan ini juga merupakan sarana untuk mempererat tali silaturahmi keluarga besar Kementerian ESDM.

Dalam rangkaian acara ini, Wamen Arcandra Tahar secara simbolis juga menyerahkan bingkisan lebaran kepada pegawai golongan I, II, satpam, cleaning service dan pengemudi di lingkungan Kementerian ESDM. ●



Hari Pertama Masuk Kerja Usai Libur Lebaran, Ditjen Migas Gelar Halal Bi Halal

Pada hari pertama masuk kerja usai libur Hari Raya Idul Fitri 1440 H, Senin (10/6), Direktorat Jenderal (Ditjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) menggelar halal bi halal dengan pejabat dan pegawai di Auditorium Migas Gedung Ibnu Sutowo, Kuningan, Jakarta.

Halal bi halal ditandai dengan bersalam-salaman, bersilaturahmi sekaligus saling memaafkan atas kesalahan yang telah lalu. Acara ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Djoko Siswanto serta para pejabat eselon II serta stakeholder.

Dalam sambutannya pada halal bi halal ini, Dirjen Migas

Djoko Siswanto memohon maaf atas kesalahan kepada seluruh pegawai Ditjen Migas. Dia juga mengharapkan agar seluruh pegawai dapat kembali bekerja dengan penuh semangat setelah menikmati libur yang cukup panjang.

Tak hanya di lingkungan Ditjen Migas, halal bi halal juga diadakan di lingkungan Kementerian ESDM yang dihadiri oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan bersama Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar. Dalam sambutannya, Jonan mengingatkan kepada seluruh pegawai agar meningkatkan kinerja yang lebih baik dari sebelumnya. ●

Submit *Online* Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2019



terhadap masing-masing unit Kerja Eselon I yang berada di lingkungan kementerian/lembaga. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (*self assesement*) oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Selanjutnya, nilai PMPRB yang telah dikirim oleh pimpinan masing-masing unit Eselon I di lingkungan ESDM secara *online*, akan ditindaklanjuti oleh Inspektur Jenderal Kementerian ESDM dan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM. Tindak lanjut tersebut berupa submit online LKE RB kementerian ESDM di Gedung Inspektorat Jenderal dan finalisasi PMPRB untuk seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian ESDM disubmit secara *online* oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM. ●

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi melakukan *submit online* Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) melalui situs pmprb.menpan.go.id. Kegiatan *submit online* ini dilakukan secara langsung oleh Dirjen Migas Djoko Siswanto di Kementerian ESDM,

Jakarta, Senin (20/5). Penilaian Reformasi Birokrasi pada tahun 2019 berbeda dengan sebelumnya di mana Penilaian Reformasi Birokrasi dilakukan secara umum hanya untuk nilai kementerian/ lembaga. Namun, pada tahun ini, PMPRB dilakukan juga penilaian



DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
GEDUNG IBNU SUTOWO
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B 5, Jakarta 12910, Telp. (021) 526 8910, Fax. (021) 526 8980



Manfaatkan Energi dengan Bijak

Guna Mewujudkan
Ketahanan Energi Untuk Negeri

Terutama energi fosil yang tidak dapat diperbaharui...
Agar masih dapat dirasakan anak cucu kita nanti...



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

GEDUNG IBNU SUTOWO
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B 5, Jakarta 12910
Telp. (021) 526 8910, Fax. (021) 526 8980
www.migas.esdm.go.id